



**PABRIK GULA PADJARAKAN
KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 1998-2005**

SKRIPSI

Oleh

**UCIK WULANDARI
NIM 110110301038**

**JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**PABRIK GULA PADJARAKAN
KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 1998-2005**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Sejarah (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sastra

Oleh

**UCIK WULANDARI
NIM 110110301038**

**JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS JEMBER
2015**

MOTTO

“Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu bersyukur kepada-Nya.”

(Q. S Al Qashash ayat: 73)

“Bayarlah upah, sebelum kering keringatnya.”

(Hadist Nabi Muhammad SAW)

“Orang tidak akan belajar sejarah kalau tidak ada gunanya. Kenyataan bahwa sejarah terus ditulis orang, di semua peradaban dan di sepanjang waktu, sebenarnya cukup menjadi bukti bahwa sejarah itu perlu.”

(Kuntowijoyo)

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan buat:

1. Ibunda Farida dan ayahanda Hairi yang tidak pernah lelah mengucapkan serangkaian doa terbaik dengan ketulusan hati untuk keberhasilan dan semangat kepadaku;
2. Guru-guruku dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, yang telah memberi ilmu dan bimbingan dengan baik;
3. Keluarga besar penulis diantaranya adik Dela Indah Widari, kakek H. Moh. Nasrullah, nenek Hj. Umi Nafisah, kakek Alm. H. Adurrahman, nenek Hj. Siti Raudah, Bapak H. Moh. Noer sekeluarga, Bapak Asip sekeluarga, Bapak Samsul sekeluarga, terimakasih atas segala do'a dan semangat yang diberikan kepadaku;
4. Almamater Fakultas Sastra Universitas Jember.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ucik Wulandari

NIM : 110110301038

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “*Pabrik Gula Padjarakan Kabupaten Probolinggo Tahun 1998-2005*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 September 2015

Yang Menyatakan

Ucik Wulandari

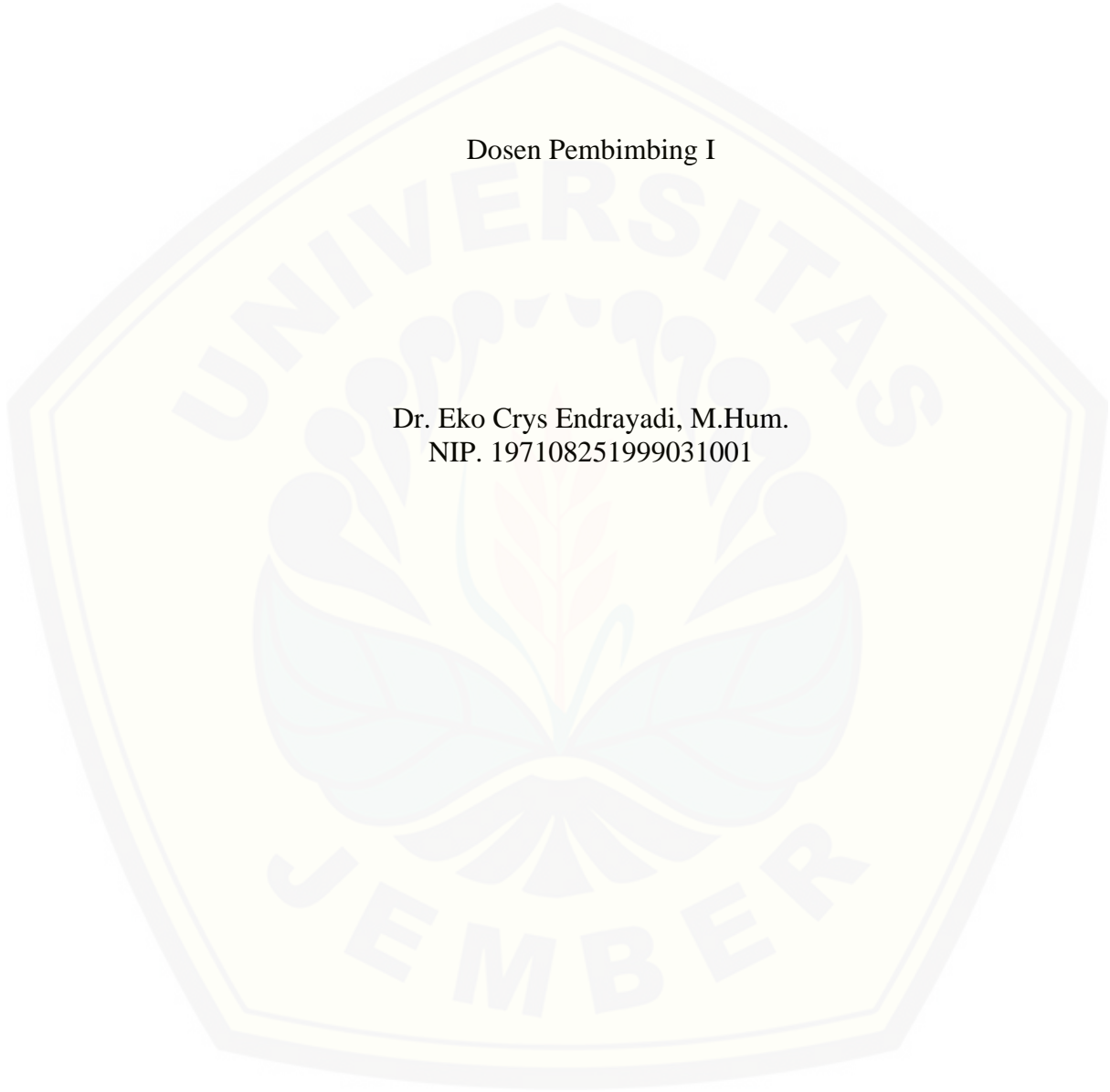
NIM. 110110301038

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan oleh:

Dosen Pembimbing I

Dr. Eko Crys Endrayadi, M.Hum.
NIP. 197108251999031001



PENGESAHAN

Diterima dan disahkan oleh

Panitia penguji Skripsi Program Strata 1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra
Universitas Jember

Pada hari :

Tanggal :

Ketua,

Dr. Eko Crys Endrayadi, M.Hum.
NIP. 197108251999031001

Anggota 1,

Anggota 2,

Dra. Dewi Salindri, M.Si
NIP. 196211061988022001

Drs. Parwata, M.Hum.
NIP. 195308111985031002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember,

Dr. Hairus Salikin, M.Ed
NIP. 196310151989021001

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini mengkaji tentang Perkembangan Pabrik Gula Padjarakan yang berjudul “*Pabrik Gula Padjarakan Kabupaten Probolinggo Tahun 1998-2005.*”

Skripsi adalah hasil tugas penyusunan karya ilmiah mandiri oleh mahasiswa pada akhir masa studinya. Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapat gelar sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember. Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Hairus Salikin, M.Ed., Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember,
2. Drs. Nawiyanto, MA., Ph.D., Ketua Jurusan Sejarah,
3. Dr. Eko Crys Endrayadi, M.Hum., Dosen pembimbing yang dengan sepenuh hati telah mengarahkan secara cermat dan meluangkan waktu, pikiran serta perhatian dalam penulisan skripsi ini,
4. Dra. Dewi Salindri, M.Si., selaku Dosen Penguji I dan Drs. Parwata, M.Hum., selaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna menguji sehingga menyempurnakan skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Sastra, khususnya Jurusan Ilmu Sejarah, yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh kuliah;
6. M. Masqotul Imam Romadlani, terima kasih telah memberikan motivasi dan meluangkan waktunya.
7. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Sastra Universitas Jember, karyawan dan staf perpustakaan pusat Universitas Jember dan Koleksi Buku Fakultas Sastra; serta Instansi yang terkait dengan penelitian penulis, terima kasih atas segala bantuan, informasi dan pelayanan selama ini;
8. Keluarga Besar Kos Ayu Bagas khususnya Dian, Fatim, Kurnia, Esi, Faizah, Latifa, Mala, Dwi, Rahmah, Juwairiyah, Maslahah, Vivi dan Neli,

serta sahabat-sahabat tercinta, Mas Yusuf, Mas Agus, Mas Didik, Mas Imam, Mbak Ulfa, Dea, Ita, Lina, Lila, Syahrial dan Mas Dhani, terima kasih atas kebersamaan dan semangatnya;

9. Keluarga besar Ilmu Sejarah Angkatan 2011 yang telah memberikan bantuan, semangat, dan kasih sayang, khususnya teman diskusi penulis, yaitu: Ifa, Nia, Zubaida, Tyas, Wuri, serta teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu sehingga dapat membangun mental penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat, motivasi dan kesempatan berdiskusi dan menambahkan referensi buku sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kalangan orang banyak.

Jember, 24 September 2015

Ucik Wulandari

DAFTAR ISI

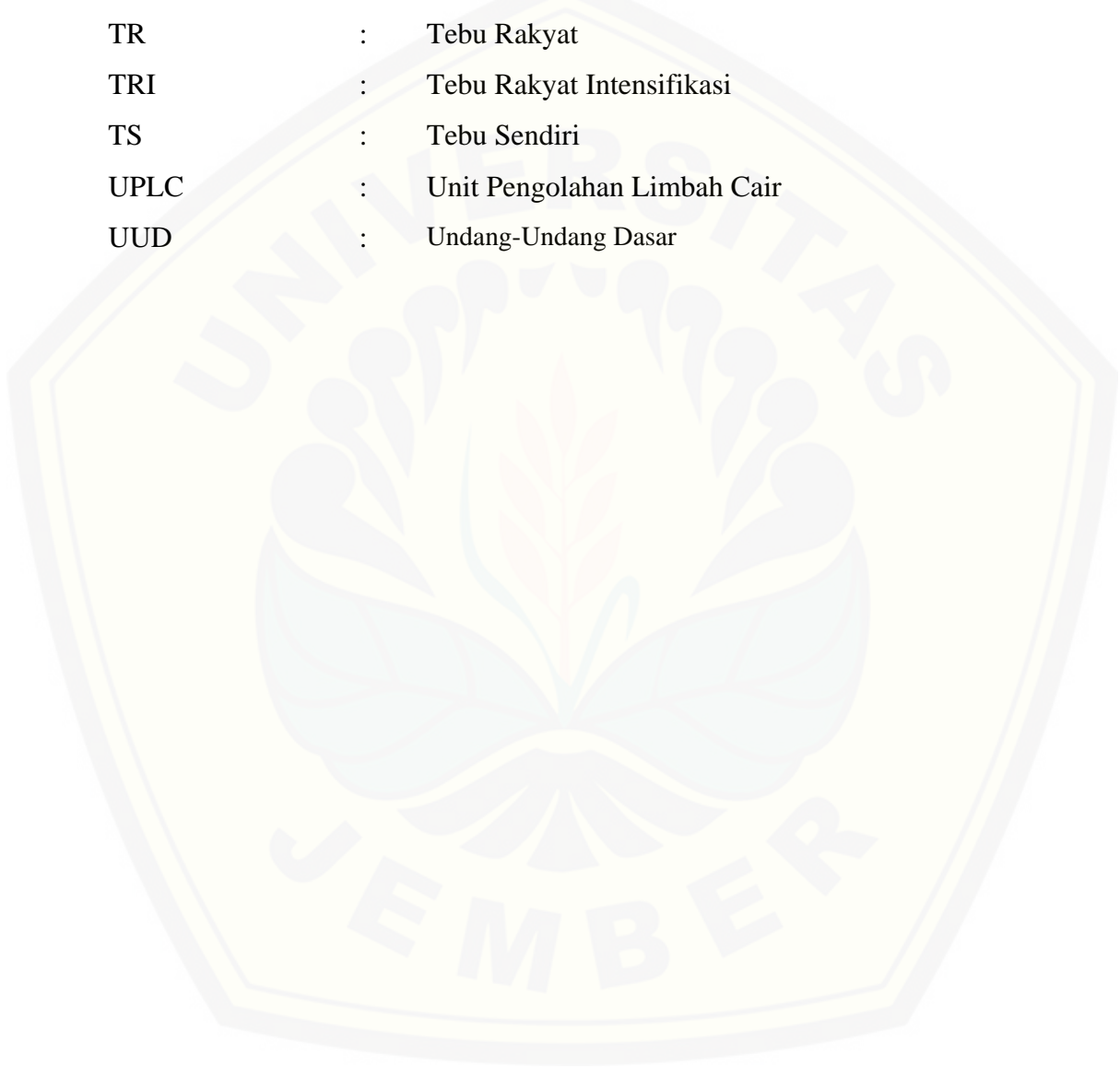
HALAMAN JUDUL	ii
MOTTO	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR ISTILAH	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
<i>ABSTRACT</i>	xx
RINGKASAN	xxi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.1.1. Tujuan Penelitian	6
1.1.2. Manfaat Penelitian	6
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.6 Pendekatan dan Kerangka Teoritis	11
1.7 Metode Penelitian	14
1.8 Sistematika Penulisan	17

BAB 2. BERDIRINYA PABRIK GULA PADJARAKAN	19
2.1 Kondisi Ekologis	19
2.2 Kondisi Demografis	24
2.3 Kondisi Sosial Ekonomi	26
2.4 Awal Berdirinya PG Padjarakan	32
BAB 3. DINAMIKA PABRIK GULA PADJARAKAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP MASYARAKAT	45
3.1 Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi	45
3.2 Perkembangan Produksi Gula dari Tahun 1998-2005	51
3.2.1 Bahan Baku Pabrik Gula	51
3.2.2 Luas Lahan Pabrik Gula	53
3.2.3 Tenaga Kerja	58
3.2.4 Hasil Produksi	64
3.3 Pemasaran Hasil Produksi	71
3.4 Pengaruh Keberadaan Pabrik Gula Padjarakan Terhadap Masyarakat Desa Sukokerto, Kecamatan Padjarakan, Kabupaten Probolinggo	75
3.4.1 Dampak Ekonomi	76
3.4.2 Dampak Sosial Budaya	78
3.4.3 Dampak Lingkungan	80
BAB 4. KESIMPULAN	85
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	93

DAFTAR SINGKATAN

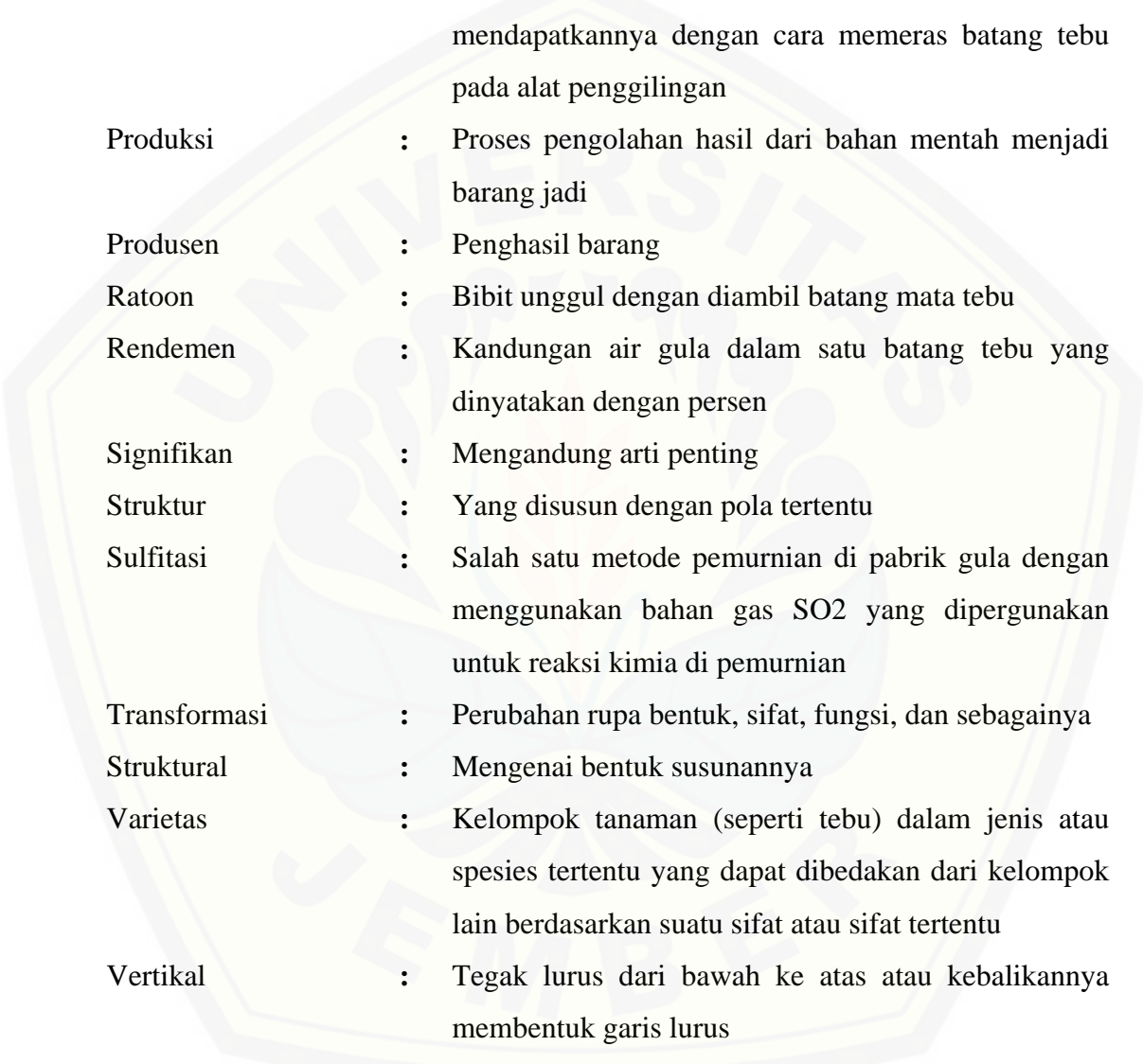
A.K.U	:	Administrasi Keuangan dan Umum
APTR	:	Asosiasi Petani Tebu Rakyat
BANAS	:	Badan Nasionalisasi
BPGN	:	Badan Penyelenggaraan Gula Negara
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPU-PPN	:	Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara
BRI	:	Bank Rakyat Indonesia
Bulog	:	Badan Urusan Logistik
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
DO	:	Delivery Order
FTK	:	Forum Temu Kemitraan
GPK	:	Gula Kristal Putih
HGU	:	Hak Guna Usaha
IGN	:	Industri Gula Nasional
IPAL	:	Instalasi Pengelolaan Limbah
IPL	:	Imbalan Penggunaan Lahan
KEPUSAR	:	Kering-Putih-Kasar
KKPE	:	Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
KPTR	:	Koperasi Petani Tebu Rakyat
Lol	:	Letter of intent
MBS	:	Manis, Bersih, dan Segar
NILM	:	Nederland Indische Landbaw Matchappy
PG	:	Pabrik Gula
PKBL	:	Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
PNP	:	Perusahaan Negara Perkebunan
PPN	:	Perusahaan Perkebunan Negara
PTP	:	Perseroan Terbatas Perkebunan
PTPN	:	Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara

SDM	:	Sumber Daya Manusia
SHS	:	Superior Hofd Suiker
SK	:	Surat Keputusan
SPTA	:	Surat Perintah Tebang Angkut
TPA	:	Tempat Pembuangan Abu
TR	:	Tebu Rakyat
TRI	:	Tebu Rakyat Intensifikasi
TS	:	Tebu Sendiri
UPLC	:	Unit Pengolahan Limbah Cair
UUD	:	Undang-Undang Dasar



DAFTAR ISTILAH

Alternatif	:	Pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan
Artetis	:	Sumur bor
Devisa	:	Alat pembayaran luar negeri yang dapat ditukarkan dengan uang luar negeri
Delivery Order	:	Rincian biaya dan pendapatan yang akan diterima oleh petani. Rincian biaya ini terdiri dari biaya BBH (biaya beban hidup), biaya terbang angkut, biaya garap, biaya pupuk, biaya bibit, biaya keamanan, biaya karung dan biaya gudang. Rincian pendapatan berupa 10% gula natura sebagai upah giling
Efektif	:	Dapat membawa hasil
Efisiensi	:	Kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat dengan tidak membuang waktu, dan tenaga biaya
Fasilitas	:	Sarana untuk melancarkan fungsi; kemudahan
Fluktuasi	:	Gejala yg menunjukkan turun-naiknya harga; keadaan turun-naik harga
Horizontal	:	Terletak pada garis atau bidang yang sejajar dengan garis datar; mendatar
Impor	:	Pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri
Industri	:	Suatu bentuk usaha baik bersifat perseroan atau firma yang aktifitasnya untuk mengubah bentuk atau menaikkan kegunaan bahan-bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi melalui proses mesin
Irigasi	:	Pengaturan pembagian atau pengaliran air menurut sistem tertentu untuk sawah
Keprasan	:	Tanaman tebu yang dipanen selama empat kali
Kerja rodi	:	Kerja paksa tanpa diberi imbalan
Komoditas	:	Barang dagangan utama
Kristal	:	Proses memisahkan gula atau sukrosa dari batang



	tebu dan mengolahnya menjadi gula
Kualitas	: Tingkat baik buruknya sesuatu
Logistik	: Pengetahuan tentang strategi atau siasat perang; bidang pengadaan barang
Nira	: Air gula yang terkandung dalam batang tebu. Cara mendapatkannya dengan cara memeras batang tebu pada alat penggilingan
Produksi	: Proses pengolahan hasil dari bahan mentah menjadi barang jadi
Produsen	: Penghasil barang
Ratoon	: Bibit unggul dengan diambil batang mata tebu
Rendemen	: Kandungan air gula dalam satu batang tebu yang dinyatakan dengan persen
Signifikan	: Mengandung arti penting
Struktur	: Yang disusun dengan pola tertentu
Sulfitasi	: Salah satu metode pemurnian di pabrik gula dengan menggunakan bahan gas SO ₂ yang dipergunakan untuk reaksi kimia di pemurnian
Transformasi	: Perubahan rupa bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya
Struktural	: Mengenai bentuk susunannya
Varietas	: Kelompok tanaman (seperti tebu) dalam jenis atau spesies tertentu yang dapat dibedakan dari kelompok lain berdasarkan suatu sifat atau sifat tertentu
Vertikal	: Tegak lurus dari bawah ke atas atau kebalikannya membentuk garis lurus

DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Halaman
2.1	Luas Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 1998	20
2.2	Luas Wilayah Desa Sukokerto Menurut Penggunaannya 1998	23
2.3	Jumlah Penduduk Kecamatan Pajarakan (dalam Jiwa) Tahun 1994-1998	25
2.4	Jumlah Rumah Ibadah di Kecamatan Pajarakan Tahun 1994-1998	28
2.5	Jenis Pekerjaan di Lahan Tebu Tahun 1998	31
2.6	Nama Administratur PG Padjarakan Tahun 1957-1998	48
2.7	Produksi Gula di PG Padjarakan Tahun 1995-1998	42
3.1	Nama Administratur PG Padjarakan Tahun 1998-2005	40
3.2	Daftar Lahan IPL di PG Padjarakan Tahun 1999-2005	55
3.3	Jumlah Karyawan PG Padjarakan 1998-2005	61
3.4	Perkembangan Produksi Gula di PG Padjarakan Tahun 1998-2005	71

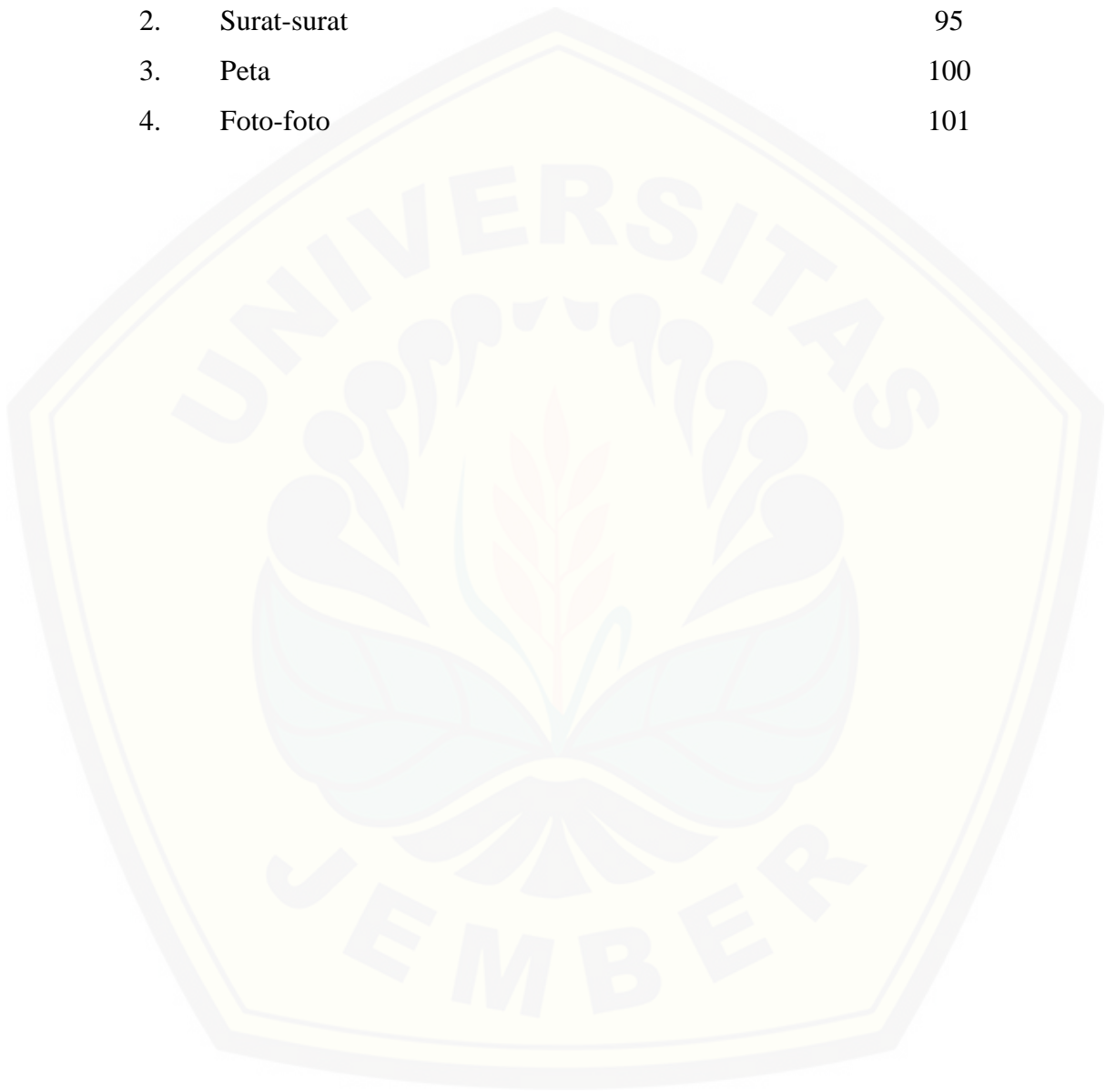
DAFTAR BAGAN

No.	Nama Bagan	Halaman
3.1	Struktur Organisasi Pabrik Gula Padjarakan	47
3.2	Skema Pemasaran Gula dengan Sistem Lelang	73



DAFTAR LAMPIRAN

No	Nama Lampiran	Halaman
1.	Daftar Informan	93
2.	Surat-surat	95
3.	Peta	100
4.	Foto-foto	101



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dinamika PG Padjarakan Kabupaten Probolinggo Tahun 1998-2005. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan Sosiologi Ekonomi dan Teori Perubahan Sosial. PG Padjarakan adalah salah satu pabrik gula yang ada di Kabupaten Probolinggo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diberlakukannya Inpres Nomer 5 Tahun 1998-2005, produksi gula PG Padjarakan mengalami peningkatan. Kebijakan tersebut memberikan kebebasan terhadap petani untuk menanam komoditi lain. Guna meningkatkan produksi gula, PG Padjarakan memutuskan untuk saling bekerjasama dengan petani dengan sistem sewa lahan. Keberadaan PG Padjarakan membawa pengaruh terhadap masyarakat sekitar di bidang ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan. Perubahan tersebut, dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat, meningkatnya pola pikir masyarakat, dan keberadaan limbah yang ditimbulkan oleh Pabrik Gula Padjarakan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.

Kata Kunci: PG Padjarakan, Dampak Ekonomi, Sosial-Budaya, Lingkungan.

ABSTRACT

This reasearch aimed to describe and analyze the dynamics of Padjarakan Sugar Factory in Probolinggo, during 1998-2005. The reasearch used sociological-economic approach and social change theory. PG Padjarakan is one of the sugar factories in Probolinggo Regency. The results showed that after the enactment of Presidential Instruction Number 5 of 1998-2005, the sugar production of Padjarakan Sugar Factory increased. The policy gave freedom to farmers to grow non-rice commodities. In order to increase the production of sugar, PG Padjarakan decided to cooperate with farmers using land lease system. The existence of PG Padjarakan influenced people in economy, socio-cultural life and environment. Such changes can be seen from the increase of economic income, the progress of public mindset and the utilization of waste generated by PG Padjarakan.

Keywords: *PG Padjarakan, Economic Influence, Socio-Cultural life, Environment.*

RINGKASAN

Pabrik Gula (PG) adalah tempat pengolahan atau memproses bahan baku tebu menjadi bahan jadi berupa gula. PG Padjarakan didirikan pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1885, di Desa Sukokerto Kecamatan Padjarakan Kabupaten Probolinggo oleh perusahaan asing bernama NILM (*Nederland Indische Landbaw Matchappy*). Berdirinya PG Padjarakan tidak terlepas dari pengaruh Sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) dan Politik Liberal (pintu terbuka) bangsa asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tanggal 17 Agustus 1945, PG Padjarakan dikuasai oleh Pemerintah RI (dikelola oleh Perusahaan Perkebunan Negara Baru Unit VI).

Pada tahun 1946, pemerintah membentuk Badan Penyelenggaraan Gula Negara (BPGN) untuk mengelola perusahaan gula milik negara (eks milik pemerintah kolonial Belanda), termasuk PG Padjarakan. Pada tahun tersebut, terjadi kemerosotan produksi di PG Padjarakan ketika dikelola oleh BPGN akibat pemerintah belum siap untuk melanjutkan produksi gula secara optimal. Tahun 1957, Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pertahanan RI melakukan pengambilalihan semua perusahaan milik Belanda melalui Kantor Direksi PTP Nusantara XI. Selanjutnya, berdasarkan UU Nomor 86 Tahun 1958 semua perusahaan perkebunan milik Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia. Guna pengelolaan, selanjutnya dibentuklah Badan Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda atau disingkat BANAS yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Badan Pengawas Umum Perusahaan Perkebunan Negara atau BPU-PPN yang berkedudukan di Jakarta dengan tugas mengawasi dan mengkoordinir kegiatan perusahaan yang berada di daerah-daerah. Di dalam perkembangannya BPU-PPN dikelompokkan sesuai dengan jenis budidaya tanamannya yaitu perkebunan yang mengelola aneka tanaman dan yang kedua adalah perkebunan yang mengelola gula. Selanjutnya, pada tahun 1957 PG Padjarakan beserta pabrik gula lainnya bergabung dalam Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Baru. Tahun 1957 sampai tahun 1996, PG Padjarakan mengalami

beberapa kali reorganisasi. Akhirnya, pada tanggal 19 Februari 1996 diadakan penggabungan dari PTP XX (Persero) dengan PTP XXIV-XXV (Persero) menjadi PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Padjarakan yang kantor direksinya berada di Surabaya. PG Padjarakan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara di bawah naungan PT Perkebunan Nusantara XI (Persero).

Sejak diterapkannya Inpres Nomor 5 Tahun 1998 PG Padjarakan mengalami kekurangan lahan, karena pada tahun tersebut memang bersamaan dengan digantinya kebijakan Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Hal ini disebabkan karena program TRI dirasa tidak efisien dengan kenyataan program TRI yang belum bisa mensejahterakan kehidupan petani seperti yang telah menjadi tujuan dibentuknya program TRI, sehingga kebijakan ini diganti oleh pemerintah dan mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 1998. Pada akhirnya, kebijakan tersebut dirasa oleh PG Padjarakan karena pabrik secara tidak langsung mengalami kekurangan lahan areal karena petani tidak memiliki keinginan membudidayakan tanaman tebu, sehingga pabrik mengalami kekurangan bahan baku. Selanjutnya, PG Padjarakan memutuskan untuk saling bekerjasama dengan petani. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan kegiatan sewa menyewa lahan terhadap petani. Pola kemitraan ini merupakan langkah cepat untuk memenuhi areal lahan tanaman tebu.

Langkah yang ditempuh oleh PG Padjarakan pada tahun 2005 untuk mencapai peningkatan produksi dengan cara, antara lain meningkatkan kinerja sumber daya manusia dan memenuhi kebutuhan bahan baku, serta produktifitas gula dengan cara memperluas lahan melalui Imbalan Penggunaan Lahan (IPL), memperluas lahan tebu rakyat melalui bekerjasama dengan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) Tebu Rakyat. Hal ini diterapkan agar petani tertarik untuk membudidayakan tanaman tebu. Akan tetapi, hal tersebut diusahakan untuk saling menguntungkan satu sama lain. Di mana pabrik mendapatkan keuntungan dalam hal pemenuhan bahan baku untuk produksinya, sedangkan pihak petani mendapatkan kesejahteraan hidup dari hasil budidaya tebu.

Keberadaan PG Padjarakan membawa dampak di bidang ekonomi karena dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar pabrik. Di bidang sosial-

budaya, PG Padjarakan meningkatkan pola pikir masyarakat yang lebih modern. Adapun di bidang lingkungan, masyarakat sekitar memanfaatkan limbah pabrik gula seperti blotong yang bisa digunakan sebagai bahan bakar dan pupuk organik.



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Negara Indonesia terletak di daerah khatulistiwa yang memiliki iklim tropis, curah hujan yang tinggi dan tanah yang subur. Kondisi alam tersebut, membuat Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang menyebabkan sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani.¹ Perubahan pertanian mempunyai pengaruh pada peningkatan ekonomi, serta berdampak pada perindustrian dan masalah sosial.² Pengertian industri adalah suatu kegiatan memproses atau mengolah, menambah, dan memperbaiki bahan-bahan atau bahan organis maupun anorganis agar bahan tersebut menjadi lebih berguna.³ Pembangunan sektor pertanian tidak terkecuali di bidang perkebunan, khususnya penanaman tebu.

¹ Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Perkebunan: Suatu Kajian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 3 .

² Kabul Santoso dkk, *Pendekatan Baru dalam Pembangunan Pedesaan Di Jawa*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996), hlm. 74.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 534.

Tebu adalah salah satu jenis tanaman yang dapat ditanam di sawah bergiliran dengan padi. Tebu memerlukan adanya irigasi, serta lingkungan yang hampir sama dengan padi. Pertumbuhan pabrik gula membuka lapangan pekerjaan baru sebagai tambahan penghasilan, hal ini membantu pemerintah mengurangi pengangguran. Usaha pemenuhan konsumsi gula harus terjamin dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan dan kelompok masyarakat. Peningkatan pabrik gula pada taraf yang tinggi akan lebih terjamin apabila para produsen dan pemilik sarana-sarana produksi (petani tebu) diikutsertakan dalam proses yang dilaksanakan.⁴

Perkebunan merupakan hal terpenting dalam sistem perekonomian Indonesia. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menyediakan komoditas sesuai yang laku di pasar dunia. Sistem perkebunan merupakan cara yang efektif untuk menghasilkan komoditas sesuai yang diinginkan, terutama untuk komoditas ekspor,⁵ sehingga banyak pabrik gula yang didirikan pada tahun 1880-an termasuk pabrik-pabrik gula di Kabupaten Probolinggo. Salah satunya adalah Pabrik Gula (PG) Padjarakan yang didirikan pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1885, di Desa Sukokerto Kecamatan Padjarakan Kabupaten Probolinggo oleh perusahaan asing yang bernama NILM (*Nederland Indische Landbouw Matchappy*).⁶ Berdirinya PG Padjarakan tidak terlepas dari pengaruh Sistem Tanam Paksa (*Cultuurstelsel*) dan juga tidak terlepas dari Politik Liberal (pintu terbuka) bangsa asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Di samping itu, dengan didukung dan dibangunnya sarana-sarana penunjang, seperti: waduk, saluran irigasi, jalan raya, jalan kereta api, dan dermaga pelabuhan.

⁴ Kuntohartono, T. *Perkebunan Indonesia Di Masa Datang*, (Jakarta: Yayasan Agroekonomi, 1983), hlm. 16.

⁵ William. J. O. Malley, "Perkebunan 1830-1940: Suatu Ikhtisar", dalam (Ed) Anne Booth, William J. O. Malley, Anne Weideman, *Sejarah Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 197.

⁶ Anonim, *Sejarah PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) Pabrik Gula Padjarakan*.

Tonggak penting yang menyangkut status perusahaan-perusahaan di Indonesia adalah perjuangan menegakkan kemerdekaan termasuk perjuangan merebut Irian Barat. Seiring dengan perjuangan masuknya Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia tersebut, maka dengan Surat Penguasa Militer/Menteri Pertahanan Nomor 1063/PMT/1957 Tanggal 5 Desember 1957, Perusahaan milik Belanda diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia (termasuk PG Padjarakan) dan kemudian diberi nama Perusahaan Perkebunan Negara Baru atau disingkat PPN Baru, selanjutnya pada tahun 1960 diadakan penggabungan antara Perusahaan Perkebunan dalam lingkup PPN Lama dengan PPN Baru menjadi suatu Lembaga Badan Pimpinan Umum Urusan Perusahaan Perkebunan Negara yang disingkat BPU-PPN yang berkedudukan di Jakarta dengan perwakilan BPU-PPN Jawa Timur Surabaya.⁷

Pada tahun 1963 diadakan reorganisasi menjadi BPU-PPN Gula Jatim Inspeksi Daerah VII. Kemudian tahun 1968 diadakan reorganisasi lagi atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1968 dari BPU-PPN Gula Jatim Inspeksi Daerah VII menjadi PNP XXIV (Perusahaan Negara Perkebunan XXIV) PG Padjarakan. Pada tahun 1974 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1974 Tanggal 13 Desember 1974 direorganisasi lagi dari PNP XXIV PG Padjarakan menjadi PTP XXIV (Persero) PG Padjarakan. Pada tahun 1975 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1975 Tanggal 28 April 1975 diadakan penggabungan antara PTP XXIV dengan PTP XXV menjadi PTP XXIV-XXV (Persero) yang kemudian bernama PTP XXIV-XXV (Persero) PG Padjarakan. Akhirnya, pada tanggal 19 Februari 1996 diadakan penggabungan dari PTP XX (Persero) dengan PTP XXIV-XXV (Persero) menjadi “PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Padjarakan”.⁸

Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang ditandai dengan adanya fluktuasi nilai dolar terhadap rupiah dan disusul menurunnya pendapatan per kapita bangsa Indonesia serta merosotnya sejumlah pabrik dan

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

industri karena tidak mampu membayar hutang yang segera jatuh tempo. Krisis ekonomi di Indonesia akhirnya merembet pada krisis politik, bahkan krisis multidimensi. Banyak pakar yang menjelaskan tentang penyebab terjadinya krisis ini. Di satu sisi, ada yang mengatakan bahwa penyebab dari krisis ekonomi ini disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi. Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa terjadinya krisis ekonomi ini disebabkan oleh faktor-faktor politik Orde Baru yang sangat represif dan otoriter. Krisis ekonomi ini berdampak juga pada pergulaan nasional. Pada masa krisis ekonomi, pemerintah tidak mampu lagi membiayai program TRI maupun program-program lain yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan memenuhi pasok kebutuhan konsumsi gula nasional. Dampak krisis ekonomi terhadap pergulaan nasional dapat dilihat dari dua aspek: aspek penyediaan gula dan aspek distribusi dan konsumsi.⁹

Sejak kehadiran Inpres Nomor 5 Tahun 1998, PG Padjarakan mengalami kekurangan lahan karena pada tahun tersebut, bersamaan dengan digantinya kebijakan Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Program TRI memiliki tujuan utama untuk meningkatkan produksi gula, meningkatkan pendapatan petani, dan kesempatan kerja.¹⁰ Tetapi program TRI ini dirasa tidak efisien dengan kenyataan program TRI yang belum bisa mensejahterakan kehidupan petani seperti yang telah menjadi tujuan dibentuknya program TRI, sehingga kebijakan ini diganti oleh pemerintah dan mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 1998. Inpres ini memberikan kebebasan kepada petani dari keharusan menanam tebu, maka dipandang perlu memberikan peranan yang lebih besar kepada petani untuk menentukan jenis tanaman yang akan dibudidayakan serta cara pembudidayaannya.¹¹ Pada akhirnya, kebijakan tersebut dirasa oleh PG Padjarakan, karena pabrik secara tidak langsung mengalami kekurangan lahan areal karena petani tidak memiliki keinginan membudidayakan tanaman tebu sehingga pabrik mengalami kekurangan bahan baku.

⁹ Dyah Estu Kurniawati, *Ekonomi Politik Kebijakan Gula Di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2010), hlm. 29.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 19.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 42.

Keberadaan PG Padjarakan di Kecamatan Pajarakan berdampak besar terhadap perubahan sosial ekonomi, baik untuk masyarakat sekitar, para tenaga kerja perkebunan, maupun pemerintah daerah. Adanya PG Padjarakan telah membuka lapangan pekerjaan terutama bagi masyarakat sekitar, sehingga meningkatkan pendapatan mereka. Peningkatan pendapatan yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat kehidupan masyarakat di Desa Sukokerto.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “*Pabrik Gula Padjarakan Kabupaten Probolinggo Tahun 1998-2005*”. Istilah “pabrik gula” berarti tempat pengolahan atau memproses bahan baku yang berupa bahan mentah menjadi bahan jadi berupa gula.¹² Pajarakan adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah perusahaan, yang menguraikan segala sesuatu yang berhubungan dengan sejarah berdirinya PG Padjarakan, perkembangan dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Sukokerto Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini fokus pada keberadaan pabrik gula yang berpengaruh kuat terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat di sekitar pabrik gula, khususnya di Desa Sukokerto.

1.2 Rumusan Masalah

Batasan masalah dalam setiap penulisan perlu dirumuskan secara jelas dengan maksud untuk membantu arah pokok permasalahan dan agar pembahasan menjadi lebih sistematis. Oleh karena itu, dalam setiap permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah penulisan harus diberi batasan yang jelas, sehingga pembahasan diperoleh sesuai dengan target yang diharapkan. Penentuan rumusan masalah itu juga untuk menghindari terjadinya kesimpang-siuran meluasnya masalah yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan PG Padjarakan Tahun 1998-2005?
2. Bagaimana kondisi PG Padjarakan setelah diterapkannya Kebijakan Inpres No. 5 Tahun 1998?

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, hlm. 1045.

3. Apa dampak sosial-ekonomi PG Padjarakan terhadap masyarakat sekitar?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Di dalam suatu penelitian haruslah terdapat tujuan penelitian yang jelas agar nantinya penulisan dapat terarah dan diketahui maksudnya. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan perkembangan PG Padjarakan dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2005.
2. Mendeskripsikan kondisi PG Padjarakan setelah diterapkannya kebijakan Inpres No. 5 Tahun 1998.
3. Mengetahui pengaruh sosial-ekonomi PG Padjarakan terhadap masyarakat sekitar.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan tentu saja memiliki ragam kegunaan, adapun kegunaan tersebut ialah sebagai wujud harapan yang diinginkan oleh penulis, hasil penelitian ini nantinya dapat ditindak lanjutkan (*follow up*) dalam pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan ini.

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, sekaligus sebagai bahan referensi dan inspirasi bagi peneliti lain yang mengambil obyek penelitian yang sejenis;
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi instansi terkait, seperti pihak PG Padjarakan, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dan Pemerintah Pusat dalam merumuskan kebijakan pabrik gula di Indonesia.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan, terutama bagi ilmu-ilmu sosial khususnya sejarah perusahaan di Indonesia.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Langkah penting yang harus dilakukan oleh seorang penulis adalah membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diambil. Penentuan ruang lingkup ini bertujuan untuk menghindari perluasan dan penyimpangan materi pokok bahasan, dengan adanya pembatasan ruang lingkup ini penulis bisa mengkaji permasalahan lebih dalam. Di dalam penulisan ini, penulis memberikan batasan spasial dan batasan temporal.

Lingkup spasial dalam penelitian ini adalah Desa Sukokerto Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo, dengan pertimbangan sebagai berikut: PG Padjarakan terletak di Desa Sukokerto Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo. Berdirinya PG Padjarakan juga menunjang bagi kondisi sosial-ekonomi masyarakat Desa Sukokerto Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo, karena dari keberadaan PG Padjarakan masyarakat yang ada di sekitarnya menjadi pekerja di pabrik gula.

Lingkup temporal dalam penelitian ini adalah tahun 1998-2005. Tahun 1998 sebagai awal penulisan, karena pada tahun tersebut, dikeluarkannya Inpres Nomor 5 Tahun 1998 di mana subsidi terhadap pabrik gula di Indonesia dihapus dan petani dibebaskan dari kewajiban untuk menanam tebu. Hal itu menyebabkan penurunan lahan dan berkurangnya keinginan petani untuk menyediakan lahan bertanam tebu. Di samping itu, pemerintah mengeluarkan Keppres No. 19 Tahun 1998 yang membatasi wewenang Badan Urusan Logistik (Bulog) hanya untuk komoditas beras. Sejak itu, Industri Gula Nasional (IGN) Indonesia masuk ke dalam area “perdagangan bebas” dengan tarif impor bea masuk 0%. Adapun tahun 2005 dijadikan sebagai batasan akhir penulisan karena pada tahun tersebut, PG Padjarakan mengalami peningkatan dalam produksi. Peningkatan produksi tersebut terjadi karena PG Padjarakan melakukan perluasan areal lahan.

Alasan pemilihan judul dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut: (1) Keberadaan PG Padjarakan yang masih bisa eksis dan masih beroperasi sampai sekarang. (2) Tersedianya cukup data sebagai sumber penelitian skripsi, sehingga menjadi motivasi bagi penulis untuk melakukan penelitian dan menyelesaikan skripsi. (3) Pengaruh PG Padjarakan

terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Sukokerto Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo 1998-2005. (4) Penelitian ini belum pernah ditulis oleh peneliti lain dalam bentuk skripsi maupun dalam bentuk tulisan lain yang mengkaji dari sudut sejarah sosial ekonomi.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian terdahulu dan yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Guna penelitian sejarah, berarti perlu dikemukakan sejarah penulisan (historiografi) dalam bidang yang akan diteliti dan seluruh hasil penelitian yang akan dikaji. Di dalam kajian ini, dikemukakan apa kekurangan para peneliti terdahulu dan akan dijadikan sebagai beberapa acuan dalam penelitian yang akan datang.¹³ Tujuan dilakukannya tinjauan pustaka adalah untuk mengetahui aspek orisinalitas atas penelitian ilmiah yang akan dilakukan.

Studi mengenai sejarah perusahaan gula erat sekali dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat sekitar, hal itulah yang menjadi sisi menarik untuk dikaji. Buku yang membahas masalah perusahaan gula sudah tersedia cukup banyak, kemudian bermanfaat untuk dijadikan sebagai acuan suatu rencana penelitian yang sama. Para sarjana yang mengkaji tentang sejarah perusahaan gula antara lain: Sartono Kartodirdjo dalam bukunya berjudul *Sejarah Perkebunan Di Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*, kajian William J.O Malley dalam artikelnya yang berjudul “Perkebunan 1830 – 1840: Suatu Ikhtisar” (ed) Anne Booth dalam buku *Sejarah Ekonomi Indonesia*,¹⁴ Dyah Estu Kurniawati dengan bukunya “*Ekonomi Politik Kebijakan Gula Di Indonesia 1998-2002*”, Djoko Surjo (dkk) dengan bukunya “*Di Bawah Asap Pabrik Gula: Masyarakat Desa di Pesisir Jawa Sepanjang Abad ke-20*”, Nursiyah dengan skripsi berjudul “Pasang Surut Pabrik Gula De Maas Di Desa Kalimas Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Tahun

¹³ Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm. 61.

¹⁴ William. J. O. Malley, *op. cit.*, hlm. 197.

1977-2000”,¹⁵ Rima Utari dengan skripsi berjudul “Pabrik Gula Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pandji Kabupaten Situbondo Tahun 1998-2008”.¹⁶

Permasalahan utama yang dikaji oleh para sarjana di atas adalah berkaitan dengan keberadaan pabrik gula dan perkebunan di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sartono Kartodirdjo misalnya membahas tentang perekonomian di Indonesia yang ditulis dengan pendekatan sosio-kultural. Pendekatan ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana kehidupan para pekerja, organisasi, dan hubungan antara pemilik tanah dan tuan-tuan tanah di tanah perkebunan. Sejalan dengan pendekatan yang digunakan, buku ini juga memaparkan tentang kebudayaan yang dianut oleh masyarakat perkebunan dengan jelas.¹⁷ Selain itu, buku ini juga dibahas secara jelas mengenai perkebunan Indonesia sejak masa pra-kolonial sebagai masa sebelum datangnya bangsa Barat ke Nusantara hingga masa pemerintahan Orde Baru, di mana perkebunan mulai kembali setelah sebelumnya terjadi penurunan yang sangat tajam.

Berbeda dengan Sartono Kartodirdjo, William J. O. Malley melihat perkembangan ekonomi masyarakat yang sangat kritis selalu mengkaitkan dengan keadaan sosial-politik di Indonesia. Kajian utama dalam buku ini yaitu mengenai keadaan sejarah ekonomi Indonesia selama zaman penjajahan Belanda, perkembangan sejarahnya hingga kemerdekaan Indonesia. Lahirnya perkebunan di Indonesia pada masa kolonial Belanda menjadi aspek penting bahkan sebagai pendorong perekonomian Indonesia. Lebih lanjut buku ini menjelaskan bahwa “adanya perkebunan membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di Indonesia misalnya menciptakan lowongan pekerja baru, dan bahkan kategori-kategori pekerjaan yang baru bagi bangsa Indonesia,

¹⁵ Nursiyah, “Pasang Surut Pabrik Gula De Maas Di Desa Kalimas Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Tahun 1977-2000”, *Skripsi* (Jember: Fakultas Sastra, 2014).

¹⁶ Rima Utari, “Pabrik Gula Pandjie Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pandji Kabupaten Situbondo Tahun 1998-2008” *Skripsi* (Jember: Fakultas Sastra, 2014)

¹⁷ Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm. 143.

namun menurut para ahli seiring dengan dampak positif itu juga terdapat masalah lainnya, seperti migrasi, urbanisasi, perbankan dan pengkreditan.¹⁸

Lain lagi dengan buku karya Dyah Estu Kurniawati. Di dalam bukunya “*Ekonomi Politik Kebijakan Gula Di Indonesia 1998-2002*” ini dibahas tentang bagaimana kebijakan gula sebelum tahun 1998 hingga tahun 2002, terutama hampir sepanjang sejarah Orde Baru pun tidak terlepas dari intervensi pemerintah. Tujuannya adalah untuk menciptakan kestabilan politik dan ekonomi dalam negeri. Gula yang merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok dinilai memiliki peranan penting. Dalam buku ini juga dibahas fakta bahwa perubahan kebijakan gula secara radikal dan fundamental pada tahun 1998 yang disebabkan karena pemerintah Indonesia menjalankan kebijakan neoliberal tuntutan IMF sebagai imbalan atas hutang luar negeri dalam upaya keluar dari krisis ekonomi tahun 1997.¹⁹

Di dalam buku karya Djoko Surjo (dkk) yang berjudul “*Di Bawah Asap Pabrik Gula: Masyarakat Desa di Pesisir Jawa Sepanjang Abad ke-20*” ini membahas tentang bagaimana perkembangan sosial ekonomi masyarakat Comal tahun 1750-1940. Penulis buku ini mempelajari tentang bagaimana gejala sosial ekonomi seperti penguasa tanah, tenaga kerja di pedesaan, peranan pabrik gula, persaingan antara usaha tani pangan dan tanaman perdagangan, dengan analisisnya melintasi tiga zaman yaitu penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, dan pascaproklamasi kemerdekaan Indonesia.²⁰

Paparan dalam buku tersebut, jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Perbedaan tersebut terletak pada pendekatan yang digunakan untuk menggali data yang mengenai sejarah berdirinya perkebunan, yang berkaitan dengan modal, produksi, distribusi, struktur organisasi pengelola perkebunan, dan juga pekerja dengan menggunakan pendekatan sosial ekonomi sejak diberlakukannya Inpres Nomor 5 Tahun 1998

¹⁸ William. J. O. Malley, *op. cit.*, hlm. 234.

¹⁹ Dyah Estu Kurniawati, *op. cit.*, hlm. 3.

²⁰ Djoko Surjo dkk, *Di Bawah Asap Pabrik Gula: Masyarakat Desa di Pesisir Jawa Sepanjang Abad ke-20*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996).

hingga tahun 2005, sedangkan skripsi yang mengkaji tentang masalah sejarah perusahaan tebu khususnya tentang pengaruh pabrik gula terhadap kondisi sosial ekonomi adalah Nursiyah dan Rima Utari. Nursiyah dalam penelitiannya mengkaji tentang apa yang menjadi penyebab Pabrik Gula De Maas mengalami penurunan dan bagaimana dampak sosial-ekonomi bagi karyawan setelah Pabrik Gula De Maas mengalami kemerosotan. Rima Utari mengkaji tentang perkembangan Pabrik Gula Pandjje setelah dikeluarkannya Inpres Nomor 5 Tahun 1998-2008, dan pengaruh Pabrik Gula Pandjje terhadap sosial-ekonomi masyarakat Kecamatan Pandji.

Hal yang membedakan skripsi ini dengan karya di atas adalah lingkup temporal dan spasial yakni tempat keberadaan PG Padjarakan di Desa Sukokerto Kecamatan Padjarakan Kabupaten Probolinggo. Namun, karya di atas sangat membantu penulis karena isi buku senada dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama mengkaji sejarah perusahaan. Hal tersebut, dijadikan oleh penulis sebagai acuan tulisan yang akan diaplikasikan pada penyusunan skripsi ini. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa karya ini belum pernah diteliti, sehingga penelitian tentang Pabrik Gula Padjarakan masih perlu dilakukan.

1.6 Pendekatan dan Kerangka Teoritis

Hal yang terpenting dalam penulisan sejarah adalah tersedianya suatu kerangka penulisan yang mencakup perlengkapan konsep dan teori yang akan dipakai dalam analisis tersebut. Mengungkap kejadian dan peristiwa sejarah, perlu beberapa konsep dan teori sebagai alat analisis terhadap sebab-sebab yang berhasil ditemukan. Pemahaman akan suatu teori dan metodologi sejarah sebagai pokok ilmu sejarah yang mulai diketengahkan apabila penulisan sejarah tidak semata-mata bertujuan menceritakan suatu kejadian dengan mengkaji sebabnya, kondisi lingkungan, sosial-kulturalnya secara mendalam hendak diadakan analisis tentang faktor-faktor kausal, kondisional, kontekstual serta unsur-unsur yang merupakan komponen dan eksponen dari proses sejarah yang dikaji sangat

penting,²¹ karena akan membimbing dalam penulisan dan sebagai dasar dari suatu argumen.

Penulisan dapat dikatakan ilmiah, apabila mengikuti teori dan metodologi sejarah yang berlaku. Bentuk penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu: suatu penulisan yang berusaha untuk memaparkan dan menyelesaikan kausalitas dari permasalahan dengan persoalan tentang apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana atau sering disebut dengan 5W dan 1H.²²

Analisis dalam penulisan ini berawal dengan menggunakan pendekatan sosiologi ekonomi. Sosiologi ekonomi adalah suatu pendekatan yang menganalisis mengenai tingkah laku individu atau kelompok yang melakukan interaksi dalam proses pemenuhan kebutuhan. Sosiologi ekonomi juga diartikan sebagai studi yang mempelajari cara orang atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap barang dan jasa dengan menggunakan pendekatan atau perspektif analisis sosiologi.²³ Sosiologi ekonomi dalam operasinya mengaplikasikan tradisi pendekatan sosiologi terhadap fenomena ekonomi.²⁴

Sosiologi ekonomi diambil dari pendapat Neil. J Smelser untuk melihat hubungan antara aktifitas ekonomi. Pendapat Semelser tersebut digunakan dalam menganalisis permasalahan yang ada yaitu pengaruh PG Padjarakan dan hubungan dengan permasalahan produksi, distribusi dan juga para buruh. Aspek penting dalam produksi meliputi, sumber daya manusia, teknologi dan juga modal. Aspek penting dari distribusi adalah meliputi aspek pengetahuan produksi

²¹ Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 2.

²² Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi: Suatu Alternatif*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm.32.

²³ Sindung Haryanto, *Sosiologi Ekonomi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 18.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 25.

dan pemasaran produksi dengan berbagai permasalahannya, sedangkan para buruh mempunyai peranan penting karena pabrik gula menyerap buruh yang banyak untuk usaha produksinya. Pendekatan ini diharapkan dapat mengupas atau menjawab permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

Teori yang digunakan untuk menganalisis PG Padjarakan Kabupaten Probolinggo adalah teori perubahan sosial menurut Selo Soemardjan dalam Soejono Soekanto. Menurut Selo, perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial menekankan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan pokok manusia. Perubahan-perubahan tersebut kemudian mempengaruhi segi-segi struktur masyarakat lainnya.²⁵ Perubahan sosial dapat dirasakan oleh para karyawan di PG Padjarakan maupun para petani tebu, karena pola pikir mereka kemudian berubah menjadi lebih modern. Perubahan sosial tersebut terjadi karena mereka mengubah pola pikir, keutamaan nilai-nilai yang bersifat material, penggunaan waktu yang efisien, dan lain-lain. Seperti halnya petani tebu yang dulunya menggarap lahan tebunya secara tradisional, kemudian mereka mendapat bimbingan dari pihak PG Padjarakan, sehingga memberikan kesadaran dan pengetahuan kepada para petani tentang pola bertani secara modern ataupun tenaga kerja yang ada di PG Padjarakan.

Perubahan sosial yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat tersebut tidak lepas dari mobilitas sosial, di mana mobilitas sosial merupakan suatu gerakan sosial dalam struktur sosial (*social structure*) yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial.²⁶ Di mana dalam perubahan sosial menekankan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan pokok manusia, sehingga di dalamnya perlu adanya pola-pola yang mengatur.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru Keempat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 337.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 249.

Ada dua macam mobilitas sosial yaitu mobilitas sosial horizontal adalah peralihan individu atau obyek-obyek dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. seperti yang terjadi pada masyarakat Sukokerto adalah suatu pergeseran dari usaha satu ke arah usaha lainnya yang baru, misalnya semula hanya menanam tanaman palawija dan tanaman pangan kemudian beralih menanam tanaman perkebunan seperti tebu, sedangkan mobilitas vertikal adalah perpindahan individu atau obyek sosial dari suatu kedudukan ke kedudukan yang lain yang tidak sederajat. Munculnya mobilitas horizontal menimbulkan lahirnya mobilitas vertikal yang terjadi karena kehidupan ekonomi atau penghasilan yang lebih mapan dari sebelumnya. Misalnya, masyarakat di Kecamatan Pajarakan dahulu hanya bekerja sebagai petani kemudian mengalami mobilitas vertikal dan beralih pekerjaan menjadi buruh PG Pajarakan, serta dengan penghasilannya sebagai buruh menjadikan kehidupannya lebih terjamin.

1.7 Metode Penelitian

Metode sejarah menurut Louis Gottschalk adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.²⁷ Metode penelitian sejarah terdiri atas empat langkah, yaitu: (1) heuristik (pengumpulan data); (2) kritik sumber (kritik eksternal dan kritik internal); (3) interpretasi; (4) historiografi.²⁸

Di dalam penelitian dan pengkajian skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan atau menceritakan keadaan suatu objek atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang kemudian dianalisis sesuai dengan data dan fakta yang ada.

Heuristik adalah suatu usaha untuk menemukan dan mengumpulkan data dari sumber-sumber sejarah, sumber tersebut dapat berupa sumber primer dan sumber skunder. *Sumber primer* adalah kesaksian seorang saksi dengan mata

²⁷ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Terj.) Nograho Notosusanto), (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975), hlm. 32.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 29 .

kepala sendiri atau saksi yang merasakan kejadian tersebut, atau dengan alat mekanis seperti diktafon, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya (bisa disebut juga dengan *saksi pandangan mata*).²⁹ Keberadaan sumber primer yang begitu memadai tersebut dapat membuktikan bahwa memang karya yang digarap ini merupakan karya yang tingkat kapabilitasnya tidak diragukan lagi berupa wawancara yang berhasil membutuhkan percakapan, namun ada banyak macam pewawancara, mulai dari pendekatan obrolan yang ramah dan informal, sampai yang lebih formal, gaya bertanya yang lebih teratur. sebuah wawancara bukanlah dialog atau obrolan, intinya adalah membiarkan narasumber berbicara.³⁰ Pada tahap ini penulis melakukan pencarian data yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, baik dengan karyawan perusahaan, buruh, pedagang kaki lima maupun masyarakat sekitar PG Padjarakan. Terkait dengan hal tersebut, metode sejarah lisan juga tidaklah ditinggalkan, sebab kebutuhan akan sumber yang otentik merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Di dalam proses metode sejarah lisan itu sendiri, biasanya meliputi masalah pengaturan *interview*, mempersiapkan *interview*, melakukan *interview*, dan menyusun kuesioner.³¹

Metode sejarah lisan dapat dipergunakan secara tunggal dan dapat pula sebagai bahan dokumenter. Sebagai metode tunggal sejarah lisan sangat penting jika dilakukan dengan cermat. Banyak sekali permasalahan sejarah bahkan dalam zaman modern ini yang tidak tertangkap dalam dokumen-dokumen. Dokumen hanya menjadi saksi dari kejadian-kejadian penting menurut kepentingan pembuat dokumen dan jamannya, tetapi tidak melestarikan kejadian-kejadian individual dan yang unik yang dialami oleh seorang dan golongan. Apalagi minat dan perhatian sejarawan akan berbeda dengan minat dan perhatian pembuat dokumen,

²⁹ *Ibid.*, hlm. 35.

³⁰ Paul Tompson, *Suara Dari Masa Silam*, Terjemahan Nugroho Notosusanto, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), hlm. 32.

³¹ Koentjaraningrat, "Metode Wawancara," dalam Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1977), hlm. 45.

sehingga sejarawan masih harus mencari sendiri cara untuk mendapatkan keterangan, dengan teknik wawancara yang benar, sehingga keabsahan keterangan-keterangan lisan pun dapat dipertanggungjawabkan.³² Wawancara dengan para tenaga kerja di PG Padjarakan seperti wawancara yang dilakukan dengan Ibu Katrien sebagai Kepala Bagian SDM, Bapak Budi sebagai Kepala Bagian Produksi dan Bapak Didit sebagai Kepala Bagian Tanaman. Sumber primer bukan hanya dari hasil wawancara saja, karena dalam sumber primer juga dapat menggunakan laporan data, dokumen, foto-foto dan koran yang berkaitan dengan masanya dari PG Padjarakan.

Sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni dari seorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. Dalam artian adalah data yang diperoleh oleh responden sebagai sumber primer sudah berada ditangan orang lain dan hasilnya diubah oleh orang kedua atau ketiga dan seterusnya.³³ Sumber sekunder diperoleh dalam bentuk buku-buku, artikel, jurnal, laporan penelitian tentang persoalan pabrik gula dan bahan-bahanini tentunya sudah mengalami banyak interpretasi dari masing-masing penulis.

Mengingat wilayah kajian tentang PG Padjarakan termasuk dalam lingkup sejarah kontemporer, penulis juga banyak bersumber pada metode sejarah lisan. Metode wawancara atau sejarah lisan biasanya mencakup mengenai masalah pengaturan *interview* yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang suatu peristiwa yang terjadi kepada responden.³⁴ Metode sejarah lisan (*oral history*) menjadi salah satu pilihan penting dalam upaya pengumpulan bahan untuk rekonstruksi dinamika gerakan masyarakat. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara langsung dilakukan terhadap para informan sejarah baik dari masyarakat di Desa Sukokerto dan petani tebu yang bersangkutan. Oleh

³² *Ibid.*, hlm. 22.

³³ Paul Tompson, *op.cit.*, hlm. 238.

³⁴ Koentjaraningrat, *op.cit.*, hlm. 162.

karena itu, keperluan penulis memanfaatkan *mp3*, *handphone* dan kamera sebagai alat perekam data.

Tahap kedua adalah kritik sumber yaitu proses analisis sumber-sumber yang telah diperoleh. Kritik sumber dibagi dua yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern adalah kritik dari luar sumber yang digunakan untuk mendapatkan keotentikan sumber.³⁵ Kritik intern adalah kritik dari dalam sumber yang digunakan untuk menguji apakah data tersebut cukup kredibel untuk menafsirkan data yang diperoleh menjadi bahan kisah sejarah.³⁶ Hal ini dapat dilakukan dengan analisis yang didasarkan pada pertanyaan siapa, kapan, di mana, apa, mengapa dan bagaimana.

Tahap ketiga interpretasi merupakan upaya penafsiran atas fakta-fakta yang diambil dari data yang valid. Fakta ini kemudian disusun menjadi sebuah konstruksi suatu peristiwa yang utuh. Pada tahap ini peran teori dan metode pendekatan berfungsi sebagai alat untuk menganalisis sekaligus menjelaskan peristiwa.

Tahap keempat historiografi merupakan langkah terakhir dalam penulisan sejarah. Historiografi diartikan sebagai penyusunan dan penulisan kembali hasil interpretasi dengan cara merangkai fakta-fakta yang diperoleh dalam sintesis sejarah, sehingga menjadi karya ilmiah sejarah yang deskriptif sesuai dengan metodologi penulisan sejarah yang disusun secara kronologis.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini tidak lain seperti halnya penulisan dalam tugas proposal skripsi. Sistematika penulisan dalam skripsi ini di bagi menjadi 4 bab. Pada bab pertama, menjelaskan mengenai pandangan umum akan judul dan karya yang akan diangkat. Sistematikanya dimulai dengan Bab 1 yang berjudul Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Subbab dan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 80.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 95.

subsubbab yang terdapat di dalamnya tidak lain mempunyai sifat yang saling terkait satu dengan yang lainnya sampai bab terakhir.

Bab 2 berjudul Berdirinya PG Padjarakan. Penjelasan dalam Bab 2 merupakan kelanjutan dari pondasi yang telah dibangun dalam Bab I. Di mana subbab dan subsubbabnya dapat memberikan penjelasan mengenai daerah penelitian secara kondisional yang kredibel. Isi subbab pertama adalah Kondisi Ekologis, Kondisi Demografis, Kondisi Sosial Ekonomi, dan Awal Berdirinya PG Padjarakan.

Pembahasan selanjutnya yang lebih mendetail dapat diperoleh dalam bab 3. Di dalam Bab 3 yang berjudul Dinamika PG Padjarakan dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Masyarakat, yang terdiri dari subbab dan subsubbab, dalam subbab pertama adalah Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi. Subbab ke 2 adalah Perkembangan Produksi Gula dari 1998-2005 yang terdiri subsubbab antara lain Bahan Baku, Tenaga Kerja dan Hasil Produksi. Subbab ke 3 Pemasaran Hasil Produksi. dan Subbab terakhir yaitu Pengaruh Keberadaan PG Padjarakan Terhadap Masyarakat Desa Sukokerto, Kecamatan Padjarakan, Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari Dampak Ekonomi, Sosial Budaya, dan Lingkungan. Pembahasan dalam Bab 3 ini beserta subbab dan subsubbabnya merupakan pembahasan inti yang menjelaskan secara rinci dan kronologis mengenai tema serta judul yang telah diangkat PG Padjarakan Kabupaten Probolinggo Tahun 1998-2005.

Pada Bab terakhir, berisi tentang Kesimpulan dan Saran. Subbab Kesimpulan dilakukan dengan harapan memperoleh kesimpulan-kesimpulan penting dari pembahasan yang telah dilakukan. Adapun subbab Saran dilakukan demi keberlangsungan penulisan yang lebih baik dan sempurna. Penulis juga mencantumkan Daftar Pustaka dan Lampiran pada sistematika selanjutnya. Daftar Pustaka dicantumkan dengan tujuan demi berlangsungnya kredibilitas yang tinggi dari hasil penulisan tersebut. Selanjutnya Lampiran, dilakukan demi faktor pendukung akan keabsahan dan penguat mengenai penelitian yang telah dikerjakan.

BAB 2.

BERDIRINYA PABRIK GULA PADJARAKAN

2.1 Kondisi Ekologis

Kabupaten Probolinggo memiliki luas 1.696,17 km² dan terletak pada posisi 7°40' -8°10' Lintang Selatan, serta 111°50' -113°30' Bujur Timur. Adapun batas-batas administratif wilayah Kabupaten Probolinggo, adalah:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura,
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Situbondo,
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember,
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan.¹

Secara geografis Kabupaten Probolinggo terletak di lereng gunung-gunung yang membujur dari barat ke timur, yakni Gunung Semeru, Gunung Argopuro dan Gunung Tengger, serta dilihat dari ketinggiannya Kabupaten Probolinggo berada pada ketinggian 0-2500 m di atas permukaan laut. Jika dilihat dari keadaan geologisnya Kabupaten Probolinggo yang terletak di ketinggian 0-2500 m tersebut, sebagai salah satu dataran yang miring dan bagian yang terendah di sebelah utara dan berbatasan dengan Selat Madura. Akibat dari kondisi geologis

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, *Probolinggo dalam Angka 1998*, (Probolinggo: Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, 1998), hlm. xxiv.

itu, tanahnya berupa tanah mekanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari letusan gunung berapi yang berupa pasir dan batu, lumpur bercampur dengan tanah liat yang berwarna kelabu kekuning-kuningan. Sifat tanah semacam ini mempunyai tingkat kesuburan dan sangat cocok untuk ditanami sayur-sayuran seperti di sekitar pegunungan Tengger yang memiliki ketinggian antara 750-2500 m di atas permukaan laut. Adapun tanah yang membujur dari barat ke timur di bagian selatan yang menyusuri kaki pegunungan Argopuro yang memiliki ketinggian 150-750 m di atas permukaan laut, sangat cocok untuk ditanami kopi dan buah-buahan. Iklim di Kabupaten Probolinggo adalah iklim tropis yang terbagi atas dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan.² Pada musim kemarau berkisar pada bulan April sampai pertengahan bulan Oktober, sedangkan musim penghujan dari pertengahan bulan Oktober sampai bulan Maret.

Luas wilayah Kabupaten Probolinggo adalah 1.696,17 km². Berikut tabel rincian luas wilayah di Kabupaten Probolinggo.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 1998

No	Wilayah	Jumlah Luas
1.	Pemukiman	147,74 km ²
2.	Persawahan	373,13 km ²
3.	Tegal	513,80 km ²
4.	Perkebunan	32,81 km ²
5.	Hutan	426,46 km ²
6.	Tambak/Kolam	13,99 km ²
7.	Lain-lain	188,23 km ²
	Jumlah	1.696,17 km²

Sumber: Badan Pusat Statistik Probolinggo, *Probolinggo dalam Angka 1998*.

Data tabel 2.1 diketahui bahwa wilayah terluas yang ada di Kabupaten Probolinggo adalah wilayah tegal. Hal ini karena penduduk di wilayah Kabupaten Probolinggo bermatapencaharian sebagai petani, sedangkan wilayah tersempit

² *Ibid.*, hlm. xxiv.

adalah wilayah tambak atau kolam. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat yang ada di Kabupaten Probolinggo kurang berminat untuk mengembangkan industri perikanan meskipun secara geografis Kabupaten Probolinggo berbatasan dengan Selat Madura. Wilayah perkebunan di Kabupaten Probolinggo hanya memiliki luas 32,81 km², akan tetapi hasil komoditi perkebunan yang diperoleh di Kabupaten Probolinggo sangat tinggi. Salah satu komoditi tersebut adalah tebu.

Kabupaten Probolinggo terbagi atas 7 wilayah pembantu bupati yakni Sukapura, Tongas, Leces, Gending, Kraksaan, Paiton, dan Gading. Kabupaten Probolinggo terdiri dari 24 kecamatan yakni Kecamatan Sukapura, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Sumber, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Tongas, Kecamatan Sumberasih, Kecamatan Wonomerto, Kecamatan Leces, Kecamatan Bantaran, Kecamatan Tegalsiwalan, Kecamatan Gending, Kecamatan Dringu, Kecamatan Banyuwang, Kecamatan Maron, Kecamatan Kraksaan, Kecamatan Krejengan, Kecamatan Besuk, Kecamatan Pajajaran, Kecamatan Paiton, Kecamatan Pakuniran, Kecamatan Kotaanyar, Kecamatan Gading, Kecamatan Tiris, dan Kecamatan Krucil, serta 330 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki jumlah desa yang paling banyak adalah Kecamatan Paiton sebanyak 20 desa, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa yang paling sedikit adalah Kecamatan Kuripan yaitu 7 desa.³

Wilayah Kabupaten Probolinggo merupakan daerah yang surplus karena memiliki tanah yang sangat subur, sehingga banyak tumbuhan yang tumbuh dengan baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah adalah jenis tanah mekanis dan mengandung banyak mineral yang diakibatkan dengan ledakan gunung berapi serta irigasi yang memadai untuk menanam tanaman padi, palawija, sayuran, buah-buahan, kopi, tebu. Kabupaten Probolinggo merupakan daerah yang memiliki potensi ekonomi di berbagai bidang seperti halnya di bidang pertanian, perkebunan, kelautan dan perindustrian.

³ *Ibid.*, hlm. xxiv.

Kecamatan Pajarakan adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang berada di bagian timur dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura,
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Krasaan dan Kecamatan Krejengan,
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Maron,
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gending dan Kecamatan Maron.⁴

Kecamatan Pajarakan berada pada ketinggian 0-10 m di atas permukaan air laut. Iklim di kawasan Kecamatan Pajarakan memiliki kesamaan dengan kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Probolinggo, yaitu iklim tropis. Kecamatan Pajarakan beriklim tropis yang terbagi menjadi dua musim yaitu, musim kemarau dan musim penghujan. Pada musim kemarau berkisar pada bulan April sampai pertengahan bulan Oktober, sedangkan musim penghujan dari pertengahan bulan Oktober sampai bulan Maret. Keadaan iklim yang ada di Kecamatan Pajarakan dapat di tinjau dengan keadaan indikator curah hujan, antara lain:

Curah hujan terbesar	: 208 mmHg
Curah hujan terkecil	: 15 mmHg
Jumlah hari hujan	: 76 hari
Curah hujan setahun	: 1.187 mmHg. ⁵

Temperatur udara Kecamatan Pajarakan seperti kecamatan lainnya yang berada di Kabupaten Probolinggo yang memiliki ketinggian 0-10 m di atas permukaan air laut, sehingga suhu udaranya masih relatif panas sebagaimana daerah dataran rendah pada umumnya yaitu antara 27°C sampai 34°C.⁶

PG Padjarakan terletak di Desa Sukokerto Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo yang memiliki topografi 0-10 m dari permukaan air laut

⁴ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kecamatan Pajarakan dalam Angka 1998*, (Probolinggo: Badan Pusat Statistik, 1998), hlm. 1.

⁵ *Ibid.*, hlm. 1.

⁶ *Ibid.*, hlm. 1.

dan luas wilayah Desa Sukokerto 3,42 km². Desa Sukokerto merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pajarakan, dengan batas-batas daerah antara lain:

1. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukomulyo,
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pajarakan Kulon,
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Karanggeger,
4. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura.⁷

Desa Sukokerto memiliki luas wilayah 3.42 km² atau 341,942 ha/m², dibagi menurut penggunaannya, seperti dijelaskan pada tabel 2.2 berikut.

Tabel: 2.2 Luas Wilayah Desa Sukokerto Menurut Penggunaannya Tahun 1998

No	Uraian	Satuan
1.	Luas Pemukiman/Pekarangan	21,958 ha/m ²
2.	Luas Tegalan	1,250 ha/m ²
3.	Luas Perkebunan	- ha/m ²
4.	Luas Kuburan	3,000 ha/m ²
5.	Luas Tambak	84,041 ha/m ²
6.	Luas Kolam	0,024 ha/m ²
7.	Luas Persawahan	205,520 ha/m ²
8.	Luas Lain-lain	26,149 ha/m ²
	Total Luas	341,942 ha/m ²

Sumber: Data Badan Pusat Statistik, *Desa Sukokerto Kecamatan Pajarakan dalam Angka 1998*.

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa luas Desa Sukokerto Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo banyak yang digunakan untuk pemukiman dan pekarangan sebanyak 21,958 ha/m², sedangkan untuk luas persawahan di Desa Sukokerto sebanyak 205,520 ha/m². Hal ini menunjukkan bahwa luas perkebunan sebagai salah satu penghasil tebu yang menghasilkan gula sebagai bahan baku produksi di Kecamatan Pajarakan dengan didirikannya PG Padjarakan. Daerah-daerah yang menjadi lahan wilayah yang ditanami tebu antara lain Desa Karangpranti, Gejungan, Karanggeger, Pajarakan Kulon, Sukomulyo, dan

⁷ Wawancara dengan Hasim, Probolinggo, 30 April 2015.

Sukokerto. Desa ini memiliki kriteria lahan yang cocok untuk ditanami tebu dengan kondisi tanah yang subur dan irigasi yang cukup memadai.

2.2 Kondisi Demografis

Sumber daya manusia merupakan komponen pembangunan yang penting selain sumber daya alam dan teknologi. Data kependudukan memegang peranan penting, dimana data kependudukan digunakan untuk memahami keadaan penduduk di suatu daerah maupun negara, sehingga perlu mendalami kajian demografi.

Demografi memiliki arti tulisan-tulisan atau karangan-karangan tentang penduduk suatu negara. Demografi mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi jumlah, penyebaran, dan komposisi penduduk. Struktur penduduk selalu berubah-ubah, dan perubahan disebabkan karena proses demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. struktur penduduk merupakan aspek yang statis yakni gambaran penduduk dari hasil sensus penduduk.⁸ Demografi tidak mempelajari penduduk sebagai individu, tetapi mempelajari tentang penduduk sebagai kumpulan, sehingga penduduk dalam kajian yaitu kelompok yang bertempat tinggal di suatu wilayah.

Secara demografis, wilayah Probolinggo adalah kawasan hunian yang relatif tua. Pada masa Majapahit keberadaan pemukiman penduduk sudah ada, sebagai buktinya dalam perjalanan Raja Hayam Wuruk yang pernah singgah di salah satu daerah yang ada di Kabupaten Probolinggo. Menurut cerita masyarakat, Kraksaan yang sekarang merupakan salah kecamatan di Kabupaten Probolinggo ini merupakan perubahan ucap dari “Krasan” yang memiliki arti betah, di mana pada waktu Raja Hayam Wuruk singgah dan ia merasa betah selama beristirahat di wilayah ini. Semenjak saat itu, wilayah ini disebut dengan Krasan. Kemudian sebutan Krasan itu beralih ucap menjadi “Kraksaan”, sehingga pada tahun 1800-an, Kraksaan merupakan sebuah kabupaten yang membawahi beberapa wilayah mulai Dringu sampai Paiton. Akan tetapi, pada masa itu tidak diketahui pasti berapa jumlah penduduk yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo. Seiring

⁸ Ida Bagus Mantra, *Pengantar Studi Demografi*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1985), hlm. 7-8.

perubahan pemerintahan, Kabupaten Kraksaan dilebur menjadi Kabupaten Probolinggo karena pusat pemerintahan dipindah ke Kota Probolinggo, sedangkan Kraksaan sendiri menjadi ibukota dari Kabupaten Probolinggo.⁹

Hasil sensus penduduk Kabupaten Probolinggo tahun 1994 sampai 1996 menunjukkan pertumbuhan penduduk Kecamatan Pajajaran relatif tinggi. Tingginya angka pertumbuhan di Kecamatan Pajajaran dikarenakan kawasan ini merupakan sentral dari pusat perdagangan. Kecamatan Pajajaran merupakan pusat kegiatan perekonomian yang sarat dengan berkembangnya pusat pertokoan, bangunan kantor dan perumahan, serta pusat kegiatan dalam bidang industri, seperti halnya industri gula yang ada di Desa Sukokerto Kecamatan Pajajaran. Adapun jumlah penduduk Kecamatan Pajajaran tahun 1994-1998, sebagai berikut.

Tabel: 2.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Pajajaran (dalam jiwa) Tahun 1994-1998

Tahun	L	P	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk
1994	13.207	13.987	27.194	–
1995	13.181	14.154	27.335	0,52%
1996	13.826	14.559	28.385	3,84%
1997	14.032	14.584	28.616	0,81%
1998	14.043	14.623	28.666	0,17%

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Probolinggo, *Kecamatan Pajajaran dalam Angka 1998*.

Dari tabel 2.3 diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo dari tahun 1997-1998 cenderung menurun. Penurunan penduduk tersebut, karena pada tahun tersebut terjadi krisis moneter. Di mana krisis moneter tersebut, mengakibatkan terjadi PHK di kebanyakan perusahaan, termasuk juga di PG Pajajaran dan pada tahun 1998 dikeluarkannya Inpres Nomor 5 Tahun 1998 yang mengakibatkan PG Pajajaran mengalami perampangan tenaga kerja. Kebanyakan dari penduduk Kecamatan Pajajaran

⁹ Anonim, Asal Usul Sejarah Kraksaan Probolinggo Pemerintahan dan Pranala Luar, [online] <http://AsalUsulSejarahKraaksaanProbolinggo.html>. di unduh pada tanggal 3 Mei 2015.

mencari pekerjaan di luar daerah mereka, bahkan sampai mencari pekerjaan di luar pulau.

2.3 Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi merupakan dampak dari suatu pembangunan negara. konsepnya merujuk pada pola kesejahteraan dengan kualitas hidup yang tinggi, memiliki hubungan yang harmonis dengan lingkungan, baik lingkungan alam atau lingkungan sosial, serta memiliki hubungan yang harmonis dengan pencipta-Nya. Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki sumber daya yang berlimpah, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Tanah yang subur serta iklim tropis membuatnya menjadi negara yang kaya akan sumber daya alam dan juga dikenal sebagai negara agraris, hal ini sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi Indonesia. Secara ekonomi Indonesia memiliki potensi besar yaitu sektor pertanian, perkebunan, dan perhutanan.¹⁰

Beragam sektor ekonomi ditekuni oleh penduduk Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ekonomi di wilayah Kabupaten Probolinggo mempunyai kaitan dengan lingkungan alam secara langsung yang meliputi beberapa sektor yakni: perkebunan, perindustrian, peternakan, pertanian, perikanan dan kehutanan. Faktor inilah peranan manusia sebagai agen perubahan lingkungan direalisasikan. Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu tempat dikembangkannya perkebunan kolonial. Perkebunan tebu merupakan sektor penting di wilayah Probolinggo dengan didirikannya beberapa pabrik gula di Kabupaten Probolinggo di antaranya di PG Padjarakan, PG Wonolangan, dan PG Gending yang masih aktif beroperasi hingga Tahun 2005. Alasan mendasar mengenai industri gula pada mulanya berkembang di Kabupaten Probolinggo adalah fakta bahwa penduduk yang menjadi dasar pelaksana perkebunan sebagai sumber tenaga kerja yang banyak dijumpai di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Proses mobilisasi masyarakat di Kabupaten Probolinggo terkait dengan kedatangan bangsa kolonial, Pemerintah Belanda dalam upaya mengembangkan

¹⁰ Suryagunawan, "Sumber Daya Alam", [online] <http://id.wikipedia.org/wiki/ac>. di unduh pada tanggal 3 Mei 2015.

usaha perkebunan dan telah melakukan migrasi besar-besaran dari daerah yang kurang produktif secara ekonomi ke daerah yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi. Hal tersebut terjadi di sekitar wilayah Kabupaten Probolinggo. Salah satu kelompok yang paling banyak bermigrasi ke tempat ini antara lain orang Eropa (Belanda), orang Cina, orang Arab dan orang Madura.¹¹

Pada bidang agama, masyarakat Kecamatan Pajarakan mayoritas beragama Islam. Keberagaman umat beragama di Kecamatan Pajarakan, selain Islam, masyarakat Kecamatan Pajarakan memeluk Agama Katolik, Agama Protestan, dan Agama Budha. Agama Protestan memiliki jumlah yang cukup lumayan besar dibandingkan dengan Agama Katolik dan Agama Budha. Pada tahun 1998 tercatat pemeluk Agama Islam yang ada di Kecamatan Pajarakan berjumlah 27.223 jiwa, pemeluk Agama Katolik berjumlah 28 jiwa, pemeluk Agama Protestan berjumlah 65 dan pemeluk Agama Budha 10 jiwa, serta Agama Hindu 9 jiwa.¹² Adapun jumlah rumah ibadah yang ada di Kecamatan Pajarakan dapat dilihat pada tabel 2.4.

¹¹ Handinoto, "Bentuk dan Struktur Kota Probolinggo Tipologi Sebuah Kota Administratif Belanda", [online] <http://www.handinot@peter.petra.ac.id>, di unduh pada tanggal 27 April 2015.

¹² Badan Pusat Statistik Probolinggo, *op.cit.*, hlm. 36.

Tabel 2.4 Jumlah Rumah Ibadah di Kecamatan Pajarakan Tahun 1994-1998

Tahun	Masjid, Langgar dan Musollah	Gereja	Vihara	Pura
1994	245	-	-	-
1995	245	-	-	-
1996	303	-	-	-
1997	303	-	-	-
1998	308	-	-	-

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Probolinggo, *Probolinggo dalam Angka 1998*.

Dari tabel 2.4 diketahui bahwa di Kecamatan Pajarakan dari tahun 1994-1998 hanya berdirinya rumah ibadah orang yang beragama Islam, karena mayoritas penduduk yang ada di Kecamatan Pajarakan menganut agama Islam. Adapun bagi mereka yang beragama Katolik dan Protestan melaksanakan ibadah di gereja yang ada di Kecamatan Kraksaan, sedangkan masyarakat yang beragama Hindu dan Budha melakukan ibadah di Kecamatan Sukapura.¹³

Masyarakat Kecamatan Pajarakan sebagaimana orang Madura pada umumnya sulit membedakan antara Islam dan Kebudayaan Madura. Hal tersebut jelas tampak pada aktivitas kehidupan masyarakat Kecamatan Pajarakan, mereka yang sehari-hari tidak bisa lepas dari dimensi agama Islam. Hal ini terlihat jelas dalam melakukan kegiatan keagamaan seperti: yasinan, tahlilan, ziarah kubur, haul (selamatan hari kematian seseorang). Kegiatan keagamaan telah menjadi tradisi bagi masyarakat setempat.¹⁴

Kontak sosial antara masyarakat Kecamatan Pajarakan, tampak dalam aktifitas perdagangan dan transportasi, terutama di masing-masing desa terdapat pasar sebagai pusat perdagangan. Salah satunya adalah Pasar Pajarakan yang

¹³ *Ibid.*, hlm. 88.

¹⁴ Wawancara dengan Bambang, Probolinggo, 30 April 2015.

menjadi salah satu bagian dari mata pencaharian masyarakat. Aktifitas perdagangan dilakukan setiap hari, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan menampung barang dagangan dari desa sekitar. Perekonomian masyarakat di Kecamatan Pajarakan tidak terlepas dari peranan sektor pertanian, sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Hasil pertaniannya berupa padi, palawija, tebu, jagung, ubi kayu, dan lain-lain. Selain untuk dipasarkan, hasil panen padi dan jagung dikonsumsi sendiri. Salah satunya juga dimanfaatkan untuk pakan ternak. Tebu sebagai tanaman penghasil gula yang memiliki prospek yang tinggi. Hal ini menarik minat petani untuk menanam tebu di samping bertanam padi dan palawija, karena produksi padi, jagung, dan tebu sangat laku di pasaran, khususnya tebu yang sangat dibutuhkan oleh industri gula sebagai bahan baku dan pada tahun 1998 dapat dilihat produksi tanaman tebu yang terjadi di Kecamatan Pajarakan mencapai 3.045,220 ton.¹⁵

Masyarakat yang berkarakteristik agraris atau pertanian dapat dilihat dari ciri-ciri berikut: 1) sifat homogen masyarakat dalam mata pencaharian, sikap hidup maupun tingkah laku, 2) adanya hubungan sosial sesama anggota masyarakat yang lebih bersifat kekeluargaan, 3) adanya sistem ekonomi jasa, yaitu menyumbang tenaga mereka untuk keperluan sosial tanpa menerima bayaran, seperti membantu diacara hajatan. Hal ini sama dengan sistem gotong royong. Kabupaten Probolinggo merupakan tempat dikembangkannya perkebunan kolonial. Salah satunya industri gula yang merupakan sektor penting di wilayah Kabupaten Probolinggo, dengan dibangunnya pabrik-pabrik gula oleh Bangsa Belanda, maka masyarakat bisa memenuhi kebutuhan secara ekonomi, dengan bekerja sebagai karyawan pabrik. Selain itu, di sektor pertanian di Kabupaten Probolinggo yang memberikan kontribusi terbesar di antaranya adalah produksi tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan.

Keberadaan industri gula memang membutuhkan tenaga kerja yang cukup besar baik tenaga kerja/karyawan yang berasal dari luar daerah Kabupaten Probolinggo maupun tenaga kerja/karyawan yang berasal dari daerah setempat, untuk menunjang kinerja para tenaga kerja/karyawan pihak PG Padjarakan

¹⁵ Badan Pusat Statistik Probolinggo, *op.cit.*, hlm. 141.

memberikan fasilitas perumahan bagi para tenaga kerja/karyawan tetap PG Pajajaran yang berasal dari luar daerah, sedangkan para tenaga kerja/karyawan tetap yang berasal dari daerah sekitar PG Pajajaran memilih untuk tinggal di rumah mereka masing-masing. Sejak keberadaan PG Pajajaran ini telah banyak bermunculan kios atau warung-warung yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para karyawan PG Pajajaran. Berdirinya kantin dan warung-warung yang ada di sekitar PG Pajajaran memberikan kemudahan bagi para tenaga kerja/karyawan yang ingin membeli makan siang. Hal tersebut terkait dengan pengaruh PG Pajajaran dalam bidang sosial ekonomi masyarakat sekitar.¹⁶

Alat transportasi merupakan sarana penting bagi masyarakat di Kecamatan Pajajaran. Segala macam aktifitas baik perdagangan maupun pertanian dan perkebunan yang sangat berguna untuk menunjang transportasi desa dengan kota. Keadaan ini didukung adanya kendaraan yang melewati Kecamatan Pajajaran seperti, angkutan pedesaan, becak dan delman. Alat transportasi seperti truk sangat berguna bagi PG Pajajaran karena dapat digunakan untuk mengangkut tebu.¹⁷ Kendaraan sebagai sarana dan prasarana transportasi, sangat mendukung kemajuan yang telah yang telah dicapai oleh daerah tersebut, terutama kemajuan ekonomi. Gambaran sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Pajajaran pada umumnya cukup baik dan lengkap.

Jenis jalan yang ada di Kecamatan Pajajaran tahun 1998 pada dasarnya terbagi atas tiga jenis jalan, yaitu aspal, batu, dan tanah. Pada setiap desa didominasi oleh jalan aspal sebagian batu, sedangkan jenis tanah hanya sebagian kecil saja. Jalan aspal yang ada di Kecamatan Pajajaran adalah 16,50 km, jalan batu 23,20 km, dan jalan tanah 27,70 km,¹⁸ dengan adanya jalan aspal yang lebih baik akan menunjang transportasi yang ada di Kecamatan Pajajaran terutama dalam hal pengangkutan tebu dari lahan penanaman menuju pabrik yang akan semakin lancar.

¹⁶ Wawancara dengan Hasim, Probolinggo, 30 April 2015.

¹⁷ Wawancara dengan Supardi, Probolinggo, 30 April 2015.

¹⁸ Badan Pusat Statistik Probolinggo, *op.cit.*, hlm. 86.

Pada musim giling PG Padjarakan banyak memerlukan tenaga kerja yang besar. Banyak pekerjaan yang harus ditangani oleh tenaga kerja manusia karena pada musim ini bersamaan dengan musim penebangan tebu (panen). Tenaga kerja yang dibutuhkan oleh PG Padjarakan berkisar 100-500 orang perhari dengan luas lahan 1 Ha. Adapun jenis pekerjaan di lahan tebu yang harus dilakukan oleh para tenaga kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Jenis Pekerjaan di Lahan Tebu Tahun 1998

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pembuat parit	30	20	50
Pembuat cempolan	28	14	42
Penanaman	54	25	79
Pemupukan	33	18	51
Pemeliharaan: menyirami	30	19	49
Menyiangi dan menggulut	22	22	44
Membuang daun kering	25	17	42
Tebang dan angkut	75	25	100
Persiapan bibit	25	18	43
Jumlah	322	178	500

Sumber: *Data Bagian Tanaman PG Padjarakan Tahun 1998.*

Dari tabel 2.5 dapat diketahui bahwa banyak jumlah pekerja di lahan tebu PG Padjarakan adalah laki-laki yaitu 322 orang. Banyaknya jumlah pekerja laki-laki dibandingkan dengan pekerja perempuan karena jenis pekerjaan yang ada di lahan tebu cenderung merupakan pekerjaan yang berat seperti halnya proses pemupukan, pembuatan cempolan, penanaman, dan penebangan yang memerlukan banyak pekerja laki-laki. Adapun pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh pekerja perempuan adalah pekerjaan yang cenderung lebih ringan seperti halnya proses menyiangi dan menggulut.¹⁹ Guna memenuhi pekerjaan yang ada di lahan tebu yang memerlukan tenaga yang banyak, terkadang PG Padjarakan

¹⁹ Menyiangi adalah mencabuti rumput agar tidak mengganggu pertumbuhan tebu, sedangkan Menggulut adalah proses penyegaran terhadap tebu.

pekerjanya tidak hanya berasal dari daerah sekitar pabrik, melainkan berasal dari luar Kabupaten Probolinggo, seperti Pasuruan dan Lumajang. Oleh karena itu, PG Padjarakan juga memanfaatkan pekerja perempuan agar pekerjaan di lahan tebu terpenuhi.²⁰

2.4 Awal Berdirinya PG Padjarakan

Sektor perkebunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pembangunan ekonomi Indonesia sudah mulai berlangsung sebelum abad ke 19, di mana pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda adalah menerapkan sistem “*Cultuurstelsel*”. *Cultuurstelsel* di Jawa sudah dimulai pada tahun 1836, dengan tujuan mentransformasi Pulau Jawa menjadi pengeksport besar-besaran dari produk-produk agraria, dan rakyat Indonesia dipaksakan untuk memproduksi dan membudidayakan berbagai produk seperti gula, kopi, tembakau, teh dan lain-lain.²¹ Sistem tanam paksa pada dasarnya merupakan penyatuan antara sistem penyerahan wajib dan sistem pajak. Pajak yang dibayarkan oleh rakyat bukan dalam bentuk uang, tetapi berupa hasil tanaman pertanian. Dengan demikian pemerintah dapat mengumpulkan produksi tanaman ekspor yang diperlukan dan kemudian dipasarkan di pasar dunia.²² Sistem tanam paksa Pemerintah Belanda memaksimalkan pemanfaatan lahan untuk ditanami tanaman komoditi ekspor, tanaman yang diwajibkan salah satunya adalah tanaman tebu yang dianggap memiliki nilai ekonomis tinggi.

Langkah-langkah pelestarian dan pengembangan sektor perkebunan merupakan tuntutan yang harus dipicu dan dilaksanakan oleh setiap pengusaha perkebunan. Selain itu pembangunan dalam sektor perkebunan juga diharuskan dapat memanfaatkan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, sehingga diperoleh daya hasil guna secara maksimal yang bermanfaat terhadap aspek sosial

²⁰ Wawancara dengan Didit, Probolinggo, Tanggal 10 Mei 2015.

²¹ Yuda B. Tangkilisan *dkk*, *Sejarah Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Defit Prima Karya, 1996), hlm. 53-54.

²² Murbyarto, *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan: Kajian Sosial Ekonomi*, (Jogyakarta: Aditya Media, 1992), hlm. 20.

dalam bentuk kesejahteraan dengan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar. Salah satunya adalah wilayah Kabupaten Probolinggo yang merupakan tempat dikembangkannya perkebunan kolonial. Mengetahui sejarah berdirinya PG Padjarakan merupakan hal yang penting, karena berguna untuk mengkaji bagaimana perkembangan dan perubahan sosial ekonomi yang terjadi di dalam pabrik maupun yang terjadi pada masyarakat sekitar pabrik. Pertumbuhan industri yang cukup menonjol dan mempunyai peranan penting dalam masyarakat Kecamatan Pajajaran adalah PG Padjarakan.

Tebu diperkenalkan pertama kali oleh imigran Cina yang datang di Pulau Jawa sekitar abad ke 15 dan sistem bercocok tanam yang mereka gunakan adalah sistem perladangan. Kemudian pada tahun 1667 datang sekelompok pedagang Belanda di Pulau Jawa yang mendirikan VOC, dengan peningkatan permintaan gula di Eropa terutama di Pantai Utara Jawa. Pabrik gula diberi kesempatan menyewa tanah rakyat dengan jangka waktu 3 tahun.²³

Era industri Indonesia dimulai pada zaman Kolonial Belanda, yang mengejutkan dari beberapa fakta, ternyata era industri ini berdekatan waktunya dengan awal perkembangan industri di Inggris dan Amerika, yaitu abad ke 18. Industri di Indonesia dimulai bersamaan dengan awal perkembangannya pabrik-pabrik gula di Jawa. Tanam paksa yang mula diterapkan pada tahun 1830, secara bertahap akhirnya dihapuskan oleh pemerintahan Belanda. Mengingat tujuan yang ingin dicapai pemerintah Belanda untuk mendapat keuntungan dari tanah jajahan, maka penghapusan sistem tanam paksa diikuti dengan kebijakan baru, yaitu politik pintu terbuka. Kebijakan baru ini berawal dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria (1870). Di dalam undang-undang ini petani tidak diwajibkan menanam tebu tetapi harus menyerahkan lahan sawahnya kepada pabrik gula dengan sistem sewa. Sejak itu mulai terbuka kesempatan pihak swasta dalam pengusahaan industri gula di Pulau Jawa.²⁴ Pendirian pabrik gula banyak

²³ Fajar Eko, "Sejarah Pabrik Gula di Pulau Jawa", [online], <http://fajareko-fs.blogspot.com/2011/11/sejarah-pabrik-gula-di-pulau-jawa.html>, diunduh pada tanggal 1 Mei 2015.

²⁴ Sritua Arief, *Ketergantungan dan Keterbelakangan*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), hlm. 50.

dilakukan oleh orang Belanda. Pemilik pabrik gula hanya diizinkan mengelola lahan sawah milik petani yang termasuk dalam wilayah kerja yang ditetapkan dalam perjanjian.

Undang-Undang Agraria pada tahun 1870 menetapkan peraturan-peraturan tataguna tanah sebagai berikut:

1. Tanah milik rakyat tidak dapat dijualbelikan kepada non-pribumi.
2. Di samping itu, tanah sebagian milik pemerintah seluas 10 bau dapat dibeli oleh non-pribumi untuk keperluan bangunan perusahaan.
3. Untuk tanah domain lebih luas ada kesempatan bagi non-pribumi memiliki hak guna, ialah:
 - a) Sebagai tanah dan hak membangun (*rech van opstal*, disingkat RVO);
 - b) Tanah sebagai *erfpacht* (hak sewa serta hak mewariskan) untuk jangka waktu 75 tahun.²⁵

Diberlakukannya Undang-Undang Agraria, yang pertama adalah alat produksi pokok ialah tanah telah dibuka kesempatan bagi non pribumi memiliki hak guna seluas-luasnya untuk membuka perusahaan perkebunan, yang kedua ialah tenaga kerja, pada tahap awal itu tidak diadakan peraturan, tidak lain karena orang beranggapan bahwa di Jawa yang padat penduduk, dengan sendirinya hal itu tersedia. Kesempatan kerja beserta upah kerja akan menciptakan pasar tenaga kerja perkebunan.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Agraria, dikeluarkannya pula Undang-Undang Gula yang bertujuan untuk mengatur pergantian penguasaan perusahaan-perusahaan pemerintah kepada pihak swasta, secara perlahan. Adapun isi dari undang-undang gula tersebut antara lain :

1. Sewa hanya dapat dilakukan antara satu sampai dua tahun.
2. Uang sewa sebesar hasil dari satu kali panen petani, kalau tanah itu dikerjakan oleh petani.

²⁵ Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Perkebunan: Suatu Kajian Sosial Ekonomi* , (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 80.

3. Investor asing wajib mengadakan perjanjian langsung atau kontrak dengan petani.²⁶

Keluarnya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula, maka terbukalah Indonesia bagi kaum liberal Eropa untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Setelah adanya modal asing yang ditanamkan di Indonesia, maka muncullah perkebunan-perkebunan asing seperti, tebu, kopi, tembakau, teh, kina, kopra, dan sebagainya. Perkebunan tebu mengalami perkembangan yang sangat pesat, karena gula merupakan mata dagang ekspor yang laku keras di pasaran Eropa.

Sistem ekonomi liberal beserta kapitalis secara lambat laun, tetapi terus menerus menunjukkan garis progresif peta pertanian pulau Jawa dan bagian utara Sumatra. Banyak pabrik gula yang didirikan di dataran rendah dengan persawahan, seperti lembah sungai Brantas bagian hilir, didirikan tahun 1880-an dan juga pabrik gula di Kabupaten Probolinggo, di Desa Sukokerto, yaitu PG Padjarakan yang didirikan pada tahun 1885 oleh perusahaan swasta Belanda yang bernama NILM (*Nederland Indische Landbau Matchappy*). Berdirinya PG Padjarakan ini tidak terlepas dari Politik Liberal (pintu terbuka) bangsa asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Berdirinya pabrik gula ini juga didukung oleh berbagai sarana yang ada disekitar PG Padjarakan seperti: jalan raya, dermaga pelabuhan, saluran irigasi, dan sungai.

Pada saat Pemerintahan Hindia Belanda, industri gula Indonesia pernah mencapai puncak produksi yang terjadi pada tahun 1929 sebesar 3 juta ton yang dihasilkan oleh 179 pabrik gula yang didukung dengan areal 200 ha atau tingkat produktivitas gula 15 ton/ha yang menempatkan Indonesia menjadi negara pengeksport kedua di dunia setelah Kuba. Menurunnya tingkat produktivitas industri gula sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 1930, yaitu pada masa depresi ekonomi global (*malaise*) yang berakibat pada runtuhnya kapitalisme perkebunan, termasuk industri gula. Setelah berakhirnya depresi ekonomi produktivitas industri gula mulai menunjukkan peningkatan, tapi hal itu tidak dapat bertahan lama

²⁶ *Ibid.*, hlm. 93.

seiring dengan berakhirnya kekuasaan Belanda.²⁷ Terkait dengan jatuhnya harga pasar dunia atau yang disebut masa depresi dunia sekitar tahun 1933 menyebabkan industri gula di Indonesia terpukul hebat. Seluruh perusahaan perkebunan telah merasakan dampak depresi tersebut, sebagai akibat dari depresi ekonomi dunia,²⁸ akan tetapi PG Padjarakan masih tetap bertahan beroperasi.

Rakyat Indonesia pada waktu itu hanya menjadi pekerja dengan upah yang sangat murah bahkan di beberapa wilayah menjadi pekerja paksa. Sebagian kecil pemilik tanah juga menikmati sedikit masa kejayaan pabrik gula pada saat itu, yaitu dengan menyewakan tanahnya untuk ditanami tebu, tetapi tentu saja dengan biaya yang sangat murah. Kejayaan pabrik gula pada masa itu tidak bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia sendiri, melainkan dinikmati oleh bangsa Belanda yang menguasai Indonesia. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada jaman kejayaan Kolonial Belanda dari cultuurstelsel tahun 1830 hingga politik liberal tahun 1940.

Sekitar tahun 1942, Bangsa Jepang masuk ke Indonesia dan mengusir bangsa Belanda. Pada masa penjajahan Jepang, pabrik-pabrik gula di Jawa banyak yang berubah fungsi menjadi pabrik dan gudang senjata Jepang. Selama masa pendudukan Jepang banyak perkebunan tebu mengalami kerusakan dan banyak pabrik gula yang ditelantarkan. Selain itu pada tahun 1943 mulai terjadi pengurangan produksi gula yang diatur dan dijalankan di bawah rencana tunggal, serta pabrik gula mengalami relokasi menjadi milik Pemerintah Jepang. Mengikuti kecenderungan umum semua pabrik gula yang menjadi kekuasaan Jepang, produksinya dari tahun ke tahun mengalami penurunan sampai pada akhirnya penanaman tebu dihentikan, dan pabrik gula dialih fungsikan menjadi pabrik yang mendukung bagi kepentingan militer.²⁹ Pada masa itu (mulai tahun 1939 sampai 1945) adalah masa perang dunia II, di mana Jepang, Jerman, Italia

²⁷ Sri Budiman, *Menyelamatkan Pabrik Gula, dalam harian Kompas edisi 25 Mei 2001*, (Jakarta: Kompas. Buletin Jawa Timur, 2001), hlm A.

²⁸ Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm. 131.

²⁹ Aikko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol, Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1993), hlm. 40.

dan Uni Sovyet berperang melawan negara-negara Eropa dan Amerika. Bangsa Jepang, dan juga negara-negara yang terlibat perang memaksimalkan seluruh kemampuan ekonomi, industri, dan ilmiahnya untuk keperluan perang, sehingga pabrik-pabrik gula tersebut tidak dipergunakan untuk fungsi yang seharusnya, melainkan dipergunakan sebagai sarana pendukung dan untuk memproduksi keperluan perang. Pada masa pemerintahan Jepang, PG Padjarakan tidak beroperasi, bahkan komplek perumahan PG Padjarakan dijadikan markas tentara Jepang, sehingga mengakibatkan sebagian besar mesin-mesinnya banyak yang rusak.

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tanggal 17 Agustus 1945, PG Padjarakan dikuasai oleh Pemerintah RI (dikelola oleh Perusahaan Perkebunan Negara Baru Unit VI). Ketika Indonesia terjadi banyak perubahan baik dalam sektor politik maupun ekonomi. Perubahan di sektor politik meliputi bentuk negara dan pemerintah sebelum merdeka. Indonesia hanya merupakan negara jajahan, sehingga segala urusan politik dikuasai penjajah termasuk pemerintahannya. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia sudah menjadi suatu negara kesatuan yang berbentuk republik dan sudah mempunyai pemerintahan sendiri. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.³⁰

Setelah berakhirnya revolusi kemerdekaan, industri gula mulai bangkit dan berbenah diri. Pada saat ini terjadi perubahan penting dalam kehidupan politik yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, yaitu perubahan politik dari Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin. Pengaruh dari perubahan tersebut adalah keluarnya Deklarasi Ekonomi yang menjadi sumber kebijakan Ekonomi Terpimpin. Sejalan dengan deklarasi di atas, pemerintah mulai mengambil alih perusahaan asing dan dikelola oleh pemerintah Indonesia, tapi dalam bidang produksi gula masih mengalami kemerosotan. Industri gula pada masa ini belum mampu mengembalikan produktifitasnya seperti yang dicapai

³⁰ UUD 1945, (Jakarta: Skretaria Negara, 1984), hlm. 8.

pada masa Kolonial. Padahal kebijakan yang diterapkan tidak berbeda jauh dari kebijakan pada masa kolonial.³¹

Pada tahun 1946 pemerintah membentuk Badan Penyelenggaraan Gula Negara (BPGN) untuk mengelola perusahaan gula milik negara (eks milik pemerintah kolonial Belanda),³² termasuk PG Padjarakan. Pada tahun tersebut terjadi kemerosotan produksi di PG Padjarakan ketika dikelola oleh BPGN, akibat pemerintah belum siap untuk melanjutkan produksi gula secara optimal. Tahun 1957 pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pertahanan RI saat itu melakukan pengambilalihan semua perusahaan milik Belanda melalui kantor Direksi PTP Nusantara XI. Selanjutnya, berdasarkan UU no 86 tahun 1958 semua perusahaan perkebunan milik Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia, untuk pengelolaan selanjutnya dibentuklah Badan Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda atau disingkat BANAS yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Badan Pengawas Umum Perusahaan Perkebunan Negara atau BPU-PPN yang berkedudukan di Jakarta dengan tugas mengawasi dan mengkoordinir kegiatan perusahaan yang berada di daerah-daerah. Dalam perkembangan di tahun-tahun berikutnya BPU-PPN dikelompokkan sesuai dengan jenis budaya tanamannya yaitu yang pertama adalah perkebunan yang mengelola aneka tanaman dan yang kedua adalah perkebunan yang mengelola gula. Perkembangan berikutnya Perusahaan Negara Perkebunan tersebut berubah bentuknya menjadi Perseroan Terbatas Perkebunan (PTP).

Setelah diambil alih pada tahun 1957 PG Padjarakan beserta pabrik gula lainnya bergabung dalam Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Baru, pada tahun 1960 peraturan mulai mengalami perubahan yang dimaksudkan untuk penyempurnaan pengawasan pemerintah dan diadakannya penggabungan Perusahaan Perkebunan Negara lama dengan Perusahaan Perkebunan Baru menjadi suatu Lembaga Badan Pimpinan Umum urusan Perusahaan Perkebunan

³¹ Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm. 173-180.

³²Arum Sabil, *Mendobrak Petani Tebu*, Dalam Rima Utari “Pabrik Gula Pandjie Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pandji Kabupaten Situbondo Tahun 1998-2008” *Skripsi* (Jember: Fakultas Sastra, 2014), hlm. 50.

Negara yang disingkat BPU-PPN yang berkedudukan di Jakarta dengan Perwakilan di Jawa Timur Surabaya.

Tahun 1963 diadakan reorganisasi menjadi BPU-PPN Gula Jatim Inspeksi Daerah VII. kemudian 1968 diadakan reorganisasi lagi atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1968 dari BPU-PPN Gula Jatim Inspeksi Daerah VII menjadi PNP XXIV (Perusahaan Negara Perkebunan XXIV) PG Padjarakan. Pada tahun 1974 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1974 Tanggal 13 Desember 1974 direorganisasi lagi dari PNP XXIV PG Padjarakan menjadi PTP XXIV (Perseroan Terbatas Perkebunan XXIV) PG Padjarakan. Kemudian pada tahun 1975 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1975 Tanggal 28 April 1975 diadakan penggabungan antara PTP XXIV dengan PTP XXV menjadi PTP XXIV-XXV (Persero) yang kemudian sampai dengan saat ini masih tetap dengan nama PTP XXIV-XXV (Persero) PG Padjarakan. Akhirnya pada tanggal 19 Februari 1996, diadakan penggabungan dari PTP XX (Persero) dengan PTP XXIV-XXV (Persero) menjadi PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) PG Padjarakan yang kantor direksinya berada di Surabaya. PG Padjarakan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara di bawah naungan PT Perkebunan Nusantara XI (Persero). Nama-nama Administratur PG Padjarakan dari tahun 1957-1998, dapat dilihat pada tabel 2.6.

**Tabel 2.6 Nama Administratur PG Padjarakan
Tahun 1957-1998**

No.	Nama Administratur PG Padjarakan	Tahun Jabatan
1.	Isman	1957 sampai 1964
2.	Ma'aroef Idris	1964 sampai 1969
3.	Slagi Muljono	1969 sampai 1970
4.	Ibnu Hidayat	1971 sampai 1976
5.	Sumarjono	1976 sampai 1977
6.	Hasjim	1977 sampai 1977
7.	Sadji Winarto	1977 sampai 1978
8.	Koespito	1978 sampai 1984
9.	Soepeno	1984 sampai 1985
10.	H. Sutiman	1985 sampai 1989
11.	Soetrisno. HR	1989 sampai 1995
12.	Trilaksito	1995 sampai 1998

Sumber: *Data Bagian Sumber Daya Manusia PG Padjarakan, 2015.*

Keberadaan PG Padjarakan di Desa Sukokerto berdampak besar terhadap perubahan sosial ekonomi baik bagi masyarakat sekitar, para tenaga kerja perkebunan maupun pemerintah daerah. PG Padjarakan telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, terutama penduduk sekitar PG Padjarakan di Desa Sukokerto, sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Peningkatan pendapatan ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat kehidupan masyarakat di Desa Sukokerto, terutama dalam peningkatan taraf ekonomi. Hal ini dapat mengubah pola perilaku dalam kehidupan masyarakat yang semakin tertekan oleh masalah ekonomi. Pada akhirnya, masyarakat desa lebih berorientasi pada uang untuk mempertahankan hidupnya karena segala sesuatu yang menyangkut kehidupan mereka selalu menggunakan uang sebagai alat penukaran.

Tingkat konsumsi gula di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang tidak diikuti oleh peningkatan produksi, karena sejak tahun 1996 pemerintah terus melakukan impor gula untuk memenuhi kebutuhan gula di

Indonesia. Peningkatan produksi yang lambat lebih disebabkan karena rendahnya produksi gula yang dihasilkan dan menurunnya luas lahan area yang ditanami tebu. Rendahnya produksi dan umur pabrik gula yang sudah tua menjadi sebuah kendala bagi pabrik gula untuk memproduksi gula lebih tinggi di Indonesia, sehingga Indonesia melakukan impor gula. Kondisi ini diperparah lagi dengan diterapkannya Inpres Nomor 5 Tahun 1998, di mana subsidi terhadap gula di Indonesia dihapus dan petani dibebaskan dari kewajiban untuk menanam tebu.

Sejak diterapkannya Inpres Nomor 5 Tahun 1998 pabrik gula mengalami kekurangan lahan, karena pada tahun tersebut memang bersamaan dengan digantinya kebijakan Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Program TRI memiliki tujuan utama untuk meningkatkan produksi gula, meningkatkan pendapatan petani, dan kesempatan kerja.³³ Akan tetapi program TRI ini dirasa tidak efisien dengan kenyataan program TRI yang belum bisa mensejahterakan kehidupan petani seperti yang telah menjadi tujuan dibentuknya program TRI, sehingga kebijakan ini diganti oleh pemerintah dan mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 1998. Pada akhirnya kebijakan tersebut dirasa oleh PG Padjajaran, karena pabrik secara tidak langsung mengalami kekurangan lahan areal karena petani tidak memiliki keinginan membudidayakan tanaman tebu sehingga pabrik mengalami kekurangan bahan baku.

Gula merupakan kebutuhan pokok penduduk di Indonesia. Fakta ini membawa konsekuensi kewajiban pemerintah untuk memenuhi ketersediaan gula di pasar domestik dengan harga yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Selain itu, industri gula merupakan sumber penghidupan lebih dari satu juta petani di Jawa dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi lebih dari setengah juta buruh tani di pedesaan, terutama di Jawa dan Sumatra. Kebijakan swasembada gula dipandang sesuai dengan kondisi di Indonesia, melihat pentingnya komoditi gula. Kebijakan swasembada ini pun dianggap tepat dalam mengantisipasi kemungkinan liberalisasi perdagangan gula di masa depan. Berikut ini tabel jumlah produksi gula di PG Padjajaran dari tahun 1995-1998.

³³ Dyah Estu Kurniawati, *Ekonomi Politik Kebijakan Gula Di Indonesia*, (Malang: UMM Press, 2010 hlm. 19.

Tabel 2.7 Produksi Gula Di PG Padjarakan Tahun 1995-1998

Tahun	Luas areal		Total Tebu		Rendemen (%)	Produksi Gula (ton)
	(ha)		(ton)			
	TS	TR	TS	TR		
1995	606,9	1.826,9	25.329,1	172.601,1	7,09	13.913,3
1996	669,7	1.367,1	31.014,1	121.261,8	7,15	10.878,2
1997	673,3	1.192,3	29.137,3	115.823,5	7,64	10.815,7
1998	676,6	766,8	35.252,3	71.330,3	5,29	5.274,1

Sumber: *Data Hasil Produksi Gula di PG Padjarakan Tahun 1998.*

Tabel 2.7 di atas menunjukkan bahwa lahan areal tanam tebu di wilayah PG Padjarakan terdiri dari lahan sendiri dan lahan rakyat. Luas lahan sendiri PG Padjarakan tahun 1995-1998 mengalami peningkatan, berbeda dengan luas lahan rakyat dari tahun 1995-1998 mengalami penurunan. Luas lahan mempengaruhi jumlah tebu yang akan dihasilkan. Luas lahan rakyat jauh lebih luas daripada luas lahan sendiri, hal ini menunjukkan peran lahan tebu rakyat sangat besar terhadap penyediaan bahan baku tebu wilayah PG Padjarakan. Pada tahun 1995 sampai tahun 1997 kualitas rendemen yang diperoleh oleh PG Padjarakan mengalami peningkatan meskipun luas lahan rakyat dan jumlah tebu rakyat yang diperoleh mengalami penurunan, tetapi pada tahun 1998, kualitas rendemen³⁴ yang diperoleh PG Padjarakan mengalami penurunan yang drastis yaitu 2,35% dari tahun sebelumnya. Hal ini bersamaan dengan diterapkannya Inpres Nomor 5 Tahun 1998, di mana Inpres tersebut memberikan kebebasan terhadap para petani untuk menanam komoditi lain di lahan pertanian mereka. Hal ini menjadikan PG Padjarakan mengalami penurunan dalam lahan areal tanaman tebu dan perolehan bahan baku, sehingga pada tahun tersebut rendemen dan jumlah produksi yang diperoleh PG Padjarakan juga menurun.

³⁴ Rendemen adalah kadar kandungan gula di dalam batang tebu yang dinyatakan dalam persen. Jadi, rendemen 10% artinya dalam 100 kg tebu akan menghasilkan gula sebanyak 10kg.

Program dalam meningkatkan produktivitas harus didukung oleh pihak-pihak yang berkaitan seperti petani, pabrik gula, pemerintah, dan lembaga pendukung yang terdiri dari lembaga lembaga penelitian gula, lembaga keuangan, dan lembaga swadaya masyarakat. Oleh karena itu, faktor utama yang harus ditempuh untuk meningkatkan produktivitas adalah upaya meningkatkan kualitas dari rendemen melalui peningkatan penerapan usaha tani dan teknis di pabrik gula secara optimal. Jika kualitas rendemen terus ditingkatkan dengan cara meningkatkan produktivitas, maka pendapatan petani akan meningkat sehingga menambah semangat petani dalam menanam tebu dan merawat teburnya, sehingga mereka enggan untuk mengganti tanaman tebu dengan komoditi lainnya.

Pengembangan areal terus dilakukan, baik lahan Tebu Sendiri (TS) maupun lahan Tebu Rakyat (TR), sejalan kapasitas pabrik gula untuk menggiling tebu lebih banyak. Tujuan utamanya adalah daerah sawah berpengairan dan teknis yang secara agronomis juga digunakan untuk budi daya padi dan palawija. Pabrik gula yakin melalui penerapan agroteknologi, kecukupan masa tanam, perbaikan manajemen tebang-angkut dan produktivitas yang meningkat akan menjadi daya tarik tersendiri bagi petani untuk menjadikan tebu sebagai komoditas alternatif. Selain itu, pengembangan juga dilakukan di lahan kering sepanjang air dapat dipompa dengan cara artesis³⁵. Perbaikan dalam kinerja pabrik dan kelancaran masa giling perlu dilakukan juga dalam hal menarik minat petani. Sadar akan pentingnya tebu rakyat dalam pemenuhan kebutuhan bahan baku pabrik dan pengembangan pabrik gula lebih lanjut, pelayanan utama terhadap petani tebu sangat diupayakan dengan baik. PG Padjarakan dalam upaya meningkatkan produktivitas, antara lain melakukan optimalisasi masa tanaman dan penataan jenis tanaman menuju komposisi yang sesuai dengan proporsi antara masak awal.

Lokasi PG Padjarakan berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat yang secara geografis menghadapi banyak hambatan dalam pengembangan areal pabrik, tetapi PG Padjarakan tetap eksis dan terus berkembang dan memberikan yang terbaik bagi kemajuan perseroan dan kejayaan industri gula nasional. Perwujudan PG Padjarakan sebagai industri ramah lingkungan dilakukan melalui

³⁵ Artesis adalah pengambilan air dari sumur dengan cara di bor.